



Katalog BPS: 2204008

TREN/POLA MIGRASI

DARI BERBAGAI SENSUS DAN SURVEI



BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA - INDONESIA



TREN/POLA MIGRASI

DARI BERBAGAI SENSUS DAN SURVEI

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA – INDONESIA

TREN/POLA MIGRASI DARI BERBAGAI SENSUS DAN SURVEI

ISBN : 978-979-064-196-9

Katalog BPS : 2204008

No. Publikasi : 04140.1001

Ukuran Buku : 16 cm x 22 cm

Naskah :

Sub Direktorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja

Gambar Kulit :

Sub Direktorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh :

TIM PENULIS
TREN/POLA MIGRASI
DARI BERBAGAI SENSUS DAN SURVEI

Pengarah : Wendy Hartanto

Editor : Rini Savitridina
Ika Luswara

Penulis : Tri Windiarto
Yeni Farida
Susmedi Aji
Olivia Aprinae

Pengolah Data : Tri Windiarto
Yeni Farida
Rismintoni

Perapihan Naskah : Susmedi Aji
Rohaeti

KATA PENGANTAR

Keragaman kondisi dan potensi antar wilayah di Indonesia merupakan situasi yang mendukung terjadinya mobilitas penduduk dalam bentuk migrasi. Informasi mengenai migrasi ini merupakan masukan yang sangat penting bagi berbagai kebijakan kependudukan diantaranya untuk perencanaan pembangunan dan pemecahan masalah sosial, terutama di kota-kota besar. Akan tetapi, para pengambilan keputusan sering dihadapkan pada langkanya data kependudukan mengenai karakteristik penduduk yang melakukan perpindahan ini.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya data dan informasi mengenai migrasi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun publikasi **Tren/Pola Migrasi dari Berbagai Sensus dan Survei** yang menyajikan pembahasan mengenai pola migrasi seumur hidup dan migrasi risen menurut pulau dan provinsi di Indonesia. Sumber utama data migran pada publikasi ini adalah dari hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Diharapkan publikasi ini dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan pengguna data dari berbagai sektor terkait. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya publikasi ini disampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan saran dari para pengguna data akan bermanfaat sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2010

Kepala Badan Pusat Statistik



DR. Rusman Heriawan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
1.2 Konsep dan Arti Penduduk	4
1.3 Konsep Migrasi Penduduk	5
1.4 Sumber Data Migrasi	7
1.5 Tujuan Penulisan.....	8
BAB II Keadaan Penduduk 1971-2005	
2.1 Komposisi Penduduk menurut Umur	9
2.2 Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin.....	13
2.3 Komposisi Penduduk menurut Kota Desa	20
2.4 Komposisi Penduduk menurut Provinsi.....	24
2.5 Persebaran Kepadatan Penduduk	26
BAB III Pola Migrasi menurut Hasil Sensus Penduduk	
3.1 Pertanyaan Tentang Migrasi di Sensus Penduduk.....	31
3.2 Migrasi Antar Pulau.....	33
3.2.1 Migrasi Seumur Hidup Antar Pulau	33
3.2.2 Migrasi Risen Antar Pulau	36
3.3 Migrasi Antar Provinsi.....	39
3.3.1 Migrasi Seumur Hidup menurut Provinsi	39
3.3.2 Migrasi Risen menurut Provinsi	45

	Halaman
BAB IV Pola Migrasi menurut Hasil SUPAS	
4.1 Pertanyaan Tentang Migrasi di SUPAS	51
4.2 Migrasi Seumur Hidup menurut Provinsi	52
4.3 Migrasi Risen menurut Provinsi	58
BAB V PENUTUP	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Distribusi Penduduk Indonesia per Pulau, Tahun 1930, 1961, 1971, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 dan 2010 2
Tabel 2.1	Penduduk menurut Kelompok Umur, 1971-2005 11
Tabel 2.2	Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur, 1971-2005 13
Tabel 2.3	Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 1971-2005 14
Tabel 2.4	Penduduk menurut Daerah Perkotaan/Perdesaan, 1971-2005 22
Tabel 2.5	Penduduk menurut Provinsi, 1971-2005 25
Tabel 2.6	Persebaran Kepadatan Penduduk, 1971-2005 28
Tabel 3.1	Pertanyaan Tentang Migrasi Penduduk Pada Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, dan 2000 31
Tabel 3.2	Persentase Migran Keluar Seumur Hidup menurut Pulau Tempat Lahir dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang, 1971-2000 34
Tabel 3.3	Persentase Migran Masuk Seumur Hidup menurut Pulau Tempat Lahir dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang, 1971-2000 36
Tabel 3.4	Persentase Migran Keluar Risen menurut Pulau Tempat Tinggal 5 Tahun yang lalu dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang, 1980-2000 37
Tabel 3.5	Persentase Migran Masuk Risen menurut Pulau Tempat Tinggal 5 Tahun yang lalu dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang, 1980-2000 38
Tabel 3.6	Migran Masuk Seumur Hidup menurut Provinsi, 1971-2000 40
Tabel 3.7	Migran Keluar Seumur Hidup menurut Provinsi, 1971-2000 42
Tabel 3.8	Migran Neto Seumur Hidup menurut Provinsi, 1971-2000 44
Tabel 3.9	Migran Masuk Risen menurut Provinsi, 1980-2000 46
Tabel 3.10	Migran Keluar Risen menurut Provinsi, 1980-2000 48

Tabel 3.11	Migran Neto Risen menurut Provinsi, 1980-2000	50
Tabel 4.1	Pertanyaan Tentang Migrasi Penduduk Pada Survei Penduduk Antar Sensus 1976, 1985, 1995, dan 2005	51
Tabel 4.2	Migran Masuk Seumur Hidup menurut Provinsi, 1985-2005.....	53
Tabel 4.3	Migran Keluar Seumur Hidup menurut Provinsi, 1985-2005	55
Tabel 4.4	Migran Neto Seumur Hidup menurut Provinsi, 1985-2005.....	57
Tabel 4.5	Migran Masuk Risen menurut Provinsi, 1985-2005	59
Tabel 4.6	Migran Keluar Risen menurut Provinsi, 1985-2005.....	61
Tabel 4.7	Migrasi Neto Risen menurut Provinsi, 1985-2005.....	63

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1971	17
Gambar 2.2 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1980	17
Gambar 2.3 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1990	19
Gambar 2.4 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2000	19

<https://www.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia berasal dari permasalahan kependudukan. Masalah tersebut terutama berkaitan dengan besarnya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk Indonesia dan sebarannya dapat dilihat pada Tabel 1.1. Pada tahun 1930 penduduk Indonesia baru berkisar 60,9 juta, 60 tahun kemudian mencapai hampir tiga kali lipat yaitu 178,5 juta di tahun 1990, tetapi 80 tahun kemudian jumlahnya sudah mencapai hampir empat kali lipat dibanding tahun 1930, yaitu 237,6 juta jiwa di tahun 2010. Jumlah penduduk yang besar akan menguntungkan bagi pembangunan jika mereka produktif, namun diperlukan modal serta investasi yang sangat besar. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi maka jumlah penduduk yang besar tersebut bahkan akan menjadi beban bagi pembangunan sosial ekonomi.

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi salah satunya disebabkan oleh tingkat fertilitas yang tinggi, yang mengakibatkan struktur umur penduduk Indonesia menjadi muda, khususnya sebelum dicanangkannya program keluarga berencana secara intensif. Hal ini ditandai dengan tingginya persentase penduduk di bawah 15 tahun dan rendahnya persentase penduduk 65 tahun ke atas. Struktur penduduk muda juga ditandai dengan rasio beban tanggungan yang tinggi. Besarnya rasio beban tanggungan ini merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi, karena sebagian pendapatan yang sebenarnya dapat ditabung yang kemudian diinvestasikan bagi pembangunan ekonomi terpaksa harus dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan primer bagi penduduk yang tidak produktif. Di samping itu, pertumbuhan angkatan kerja juga menjadi tinggi, yang merupakan beban pembangunan yang harus membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi mereka.

Masalah lain yaitu persebaran penduduk yang sangat tidak merata, merupakan ciri yang sangat tidak menguntungkan. Pulau Jawa yang merupakan pulau terkecil di antara 5 pulau

utama mempunyai penduduk terbanyak, sehingga pulau ini menjadi daerah yang terpadat penduduknya. Dari tahun 1930 sampai dengan 1990 pulau Jawa dihuni oleh lebih dari 60 persen penduduk Indonesia, sedangkan pada tahun 1995, 2000, 2005 dan 2010 angka ini sedikit di bawah 60 persen.

Tabel 1.1
Distribusi Penduduk Indonesia per Pulau
Tahun 1930, 1961, 1971, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, dan 2010
(x 1.000.000)

Tahun		Pulau					Jumlah
		Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Kepulauan Lain	
1930	Jumlah	41,7	8,2	2,2	4,2	4,6	60,9
	%	68,7	13,5	3,6	6,9	7,3	100,0
1961	Jumlah	63	15,7	4,1	7,1	7,1	97,0
	%	65	16,2	4,2	7,3	7,3	100,0
1971	Jumlah	76	20,8	5,2	8,5	7,9	118,4
	%	64,2	17,6	4,4	7,2	6,6	100,0
1980	Jumlah	91,2	28	6,7	10,4	10,5	146,8
	%	62,1	19,1	4,6	7,1	7,1	100,0
1985	Jumlah	99,9	32,6	7,7	11,6	11,7	163,4
	%	61,1	20,0	4,7	7,1	7,2	100,0
1990	Jumlah	107,5	36,5	9,1	12,5	12,9	178,5
	%	60,2	20,4	5,1	7	7,2	100,0
1995	Jumlah	114,7	40,8	10,5	13,7	14,1	193,9
	%	59,2	21,1	5,4	7,1	7,3	100,0
2000	Jumlah	120,9	40,6	11	14,4	14,3	201,2
	%	60,1	20,2	5,4	7,2	7,1	100,0
2005	Jumlah	128	45,1	12,1	15,7	16,4	217,3
	%	58,9	20,8	5,6	7,2	7,5	100,0
2010	Jumlah	136,6	50,6	13,8	17,4	19,2	237,6
	%	57,5	21,3	5,8	7,3	8,1	100,0
Luas (%)		6,9	24,7	28,1	9,9	30,4	100,0

Ketidakmerataan penduduk ini mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan baik fisik maupun mental, yang selanjutnya mengakibatkan keinginan untuk pindah menjadi tinggi. Arus perpindahan penduduk biasanya bergerak dari daerah yang agak terbelakang

pembangunannya ke daerah yang lebih maju, sehingga daerah yang sudah padat menjadi semakin padat, karena biasanya daerah yang sudah maju lebih padat penduduknya. Di samping itu ada juga daerah-daerah yang penduduknya mempunyai sifat atau kebiasaan pindah ke daerah yang lain atau lebih sering disebut dengan merantau. Daerah-daerah tersebut adalah Sumatera Barat dengan suku Minangkabau, Sulawesi Selatan dengan suku Bugis dan Sumatera Utara dengan suku Bataknya.

Akibat lain dari ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia adalah terjadinya kelebihan penduduk di Jawa dan kekurangan penduduk di luar Jawa. Masalah ini telah disadari sejak pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia. Untuk memecahkan masalah ini pemerintah saat itu melaksanakan program pemindahan penduduk ke luar Jawa yang disebut dengan program kolonisasi. Setelah kemerdekaan program kolonisasi diteruskan oleh pemerintah Indonesia, hanya terminologi kolonisasi diganti dengan nama transmigrasi (Amral Sjamsu, 1960: 78). Sejak pemerintahan orde baru program transmigrasi disempurnakan dan diperluas sehingga tujuan utamanya adalah peningkatan taraf hidup, pengembangan daerah, dan redistribusi penduduk. Sejalan dengan program redistribusi penduduk tersebut, pemerintah juga menggalakkan pembangunan di segala bidang. Pusat-pusat pertumbuhan (pusat-pusat pendidikan, perdagangan, dan industri) telah dibangun di provinsi-provinsi di luar Jawa. Prasarana transportasi baik darat, laut, maupun udara yang menghubungkan daerah-daerah di seluruh nusantara telah ditingkatkan atau dibangun yang baru bagi yang belum ada. Keadaan ini menyebabkan mobilitas penduduk antar wilayah di Indonesia semakin meningkat. Perpindahan penduduk ini disusul oleh perpindahan para sanak keluarga secara swakarsa.

Para migran merupakan pelopor dalam redistribusi penduduk di Indonesia. Mereka merupakan sumber informasi secara tidak langsung mengenai keadaan daerah permukiman baru. Mereka merupakan titik-titik api yang akan menarik para migran dari daerah asal.

Dari uraian-uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa migrasi penduduk antar wilayah di Indonesia sudah sejak lama terjadi. Volume dan arus migrasi penduduk semakin meningkat sejalan dengan derap pembangunan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Migrasi penduduk yang semakin meningkat ini mempengaruhi dampak pada persebaran dan komposisi penduduk. Dengan tersedianya data Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk

Antar Sensus (SUPAS), maka perlu dilakukan analisa migrasi untuk mengetahui pola, volume dan arus migrasi antar pulau dan antar provinsi.

1.2 Konsep dan Arti Penduduk

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang secara geografis terdiri atas kepulauan serta penduduknya terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa. Karena letaknya yang berdekatan, membuat penduduk Indonesia melakukan perpindahan ke suatu daerah untuk mendapatkan penghidupan yang layak serta mencapai keadaan lingkungan yang nyaman. Untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik dan pemerataan pembangunan di segala bidang, misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, pemerintah Indonesia memerlukan data mengenai karakteristik kependudukan seperti susunan umur, persebaran penduduk, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus tersedia data penduduk secara berkesinambungan, tepat waktu, akurat dan sederet persyaratan lain melalui pengumpulan data dari berbagai sumber.

Selama ini kita mengenal adanya tiga sumber utama data kependudukan yaitu sensus penduduk, survei sampel dibidang kependudukan dan registrasi penduduk. BPS melaksanakan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali, sedangkan SUPAS dilaksanakan untuk menjembatani data kependudukan dalam rentang antara dua sensus. Sensus merupakan pencacahan seluruh penduduk pada suatu saat yang bersamaan dan mencakup seluruh wilayah geografis suatu negara/daerah. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Konsep pencacahan yang digunakan adalah kombinasi dari konsep *de jure* dan *de facto*.

Pada konsep *de jure* diartikan bahwa penduduk akan dicatat dimana ia biasa bertempat tinggal. Seseorang dikatakan menetap di suatu tempat, jika ia telah tinggal disana selama 6 bulan atau lebih, atau berniat untuk menetap. Penduduk yang pada waktu pencacahan tidak berada di tempat tinggalnya atau sedang berpergian kurang dari 6 bulan, dicacah di tempat ia biasa tinggal. Sedang bagi mereka yang berpergian lebih dari 6 bulan, orang-orang yang tidak

mempunyai tempat tinggal tetap, dan mereka yang mempunyai lebih dari satu tempat tinggal tetap, akan dicatat di tempat dimana ia ditemui (*de facto*) oleh petugas sensus. Penggunaan konsep tersebut serta penentuan batas waktu 6 bulan dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindarkan, atau paling tidak memperkecil kemungkinan penduduk terlewat cacah atau tercacah ulang. Batasan-batasan tersebut telah digunakan sejak SP 1961.

Keragaman kondisi dan potensi antar wilayah di Indonesia merupakan situasi yang mendukung terjadinya mobilitas penduduk dalam bentuk migrasi. Sejumlah penduduk terdorong untuk berpindah karena antara satu tempat dengan tempat lainnya berbeda peluang dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

1.3 Konsep Migrasi Penduduk

Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk merupakan fenomena sosial yang sudah tidak asing lagi. Pola mobilitas di Indonesia telah diwarnai oleh mobilitas non permanen dan permanen dengan arah yang berubah (Ananta dan Chotib, 1998). Mobilitas penduduk ada yang bersifat non permanen (sementara) misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen (menetap). Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi.

Migrasi di Indonesia ada yang bersifat swakarsa dan ada yang disponsori oleh pemerintah. Jenis yang terakhir ini dikenal dengan transmigrasi. Suatu daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan melebihi kapasitas daya dukung alam dan lingkungan dapat menjadi penyebab rendahnya tingkat pendapatan penduduk setempat dan menimbulkan kemiskinan sehingga mendorong penduduk untuk melakukan migrasi dari daerah yang satu ke daerah yang lain yang memberi harapan lebih baik bagi kehidupan (Ismail, 2000).

Migrasi dapat terjadi di dalam satu negara maupun antarnegara. Berdasarkan hal tersebut, migrasi dapat dibagi atas dua golongan yaitu migrasi nasional dan migrasi internasional. Migrasi Nasional atau Internal, yaitu perpindahan penduduk di dalam satu negara.

Migrasi internal terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Urbanisasi*, yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap.
2. *Transmigrasi*, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Republik Indonesia.
3. *Ruralisasi*, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi.

Migrasi Internasional yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya.

Migrasi internasional dapat dibedakan atas tiga macam yaitu :

1. *Imigrasi*, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran;
2. *Emigrasi*, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran;
3. *Remigrasi* atau *repatriasi*, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya.

Selain jenis migrasi yang disebutkan di atas, terdapat jenis migrasi yang disebut evakuasi. Evakuasi adalah perpindahan penduduk yang terjadi karena adanya ancaman akibat bahaya perang, bencana alam dan sebagainya. Evakuasi dapat bersifat nasional maupun internasional.

Secara demografis migrasi mempunyai dampak yang luas pada perubahan jumlah dan struktur kependudukan, perubahan pada wilayah yang ditinggalkan maupun wilayah yang dituju, karena para migran itu mempunyai karakteristik yang khas (United Nation:1958). Bertambah atau berkurangnya penduduk suatu wilayah akan merubah komposisi umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan sebagainya. Perubahan tersebut akan berpengaruh pula pada aspek fertilitas, mortalitas, ketenagakerjaan dan struktur rumah tangga.

Dampak yang dapat dilihat dari proses migrasi adalah bertambahnya penduduk di kota-kota besar. Kota-kota besar, utamanya Jakarta merupakan daerah tujuan utama bagi pelaku mobilitas penduduk. Migrasi masuk ke kota (termasuk Kota Jakarta) sangat erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang bersifat *urban bias*. Pembangunan yang terjadi di Jakarta memiliki peran dan fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, sehingga menarik penduduk desa untuk datang ke kota untuk mendapatkan kesempatan kerja/usaha. Lebih-lebih ketika lapangan

pekerjaan di desa sangat terbatas. Fenomena ini sejalan dengan teori *shryock dan siegel* (1976) yang menjelaskan bahwa terjadinya perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah/pendapatan yang diperoleh di daerah tujuan, sehingga menambah banyaknya penduduk di daerah perkotaan.

Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Bouge (1969) bahwa migrasi adalah komponen demografi yang mempelajari mengenai studi statistik dan matematis tentang jumlah, komposisi dan persebaran penduduk, serta perubahan faktor-faktor penduduk setelah melewati kurun waktu tertentu. Kedatangan migran (baik permanen maupun non-permanen) di daerah perkotaan berdampak positif maupun negatif, tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak terlibat. Dari sisi pelaku migrasi, melakukan mobilitas ke kota merupakan suatu hal yang positif karena mereka dapat memperoleh penghasilan/upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya perpindahan. Sebaliknya, arus migrasi ke kota yang cukup besar pada umumnya dipandang negatif bagi kepentingan kota yang memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sosial, lingkungan, keindahan dan ketertiban.

1.4 Sumber Data Migrasi

Sumber utama data statistik migrasi saat ini adalah dari SP dan SUPAS. Sejak Indonesia merdeka telah diselenggarakan SP sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Untuk SUPAS, BPS sudah melaksanakannya sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1976, 1985, 1995 dan 2005. Dari SP dan SUPAS ini diperoleh informasi yang berkaitan dengan migrasi seperti tempat lahir, tempat tinggal sebelumnya, lamanya tinggal di tempat tinggal sebelumnya, tempat tinggal 5 tahun yang lalu, dan alasan pindah dari tempat tinggal 5 tahun yang lalu.

Sumber data lain yang sangat potensial berasal dari sistem administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1977, registrasi penduduk berfungsi mencatat beberapa peristiwa vital, seperti kelahiran, kematian dan perpindahan. Namun data tersebut masih dianggap kurang *reliabel* karena sistemnya sangat bergantung pada pelaporan dari penduduk. Banyak penduduk yang masih enggan untuk melaporkan kejadian vital yang dialaminya.

Sementara survei atau studi khusus migrasi yang diselenggarakan oleh lembaga penelitian dan pendidikan belum dapat mencakup seluruh wilayah nusantara, tapi lebih sering bersifat studi kasus. Registrasi kependudukan yang sangat penting sebagai dasar berbagai penelitian kependudukan termasuk data tentang kelahiran yang sangat berpengaruh dalam penyusunan perencanaan bidang kependudukan dirasakan masih jauh dari sempurna, sehingga data perpindahan yang lebih terandalkan hingga kini adalah SP dan SUPAS.

1.5 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan arus dan pola perpindahan penduduk di Indonesia berdasarkan hasil SP dan SUPAS. Baik arus maupun pola migrasi yang disampaikan terbatas hanya sampai tingkat provinsi dan per pulau saja, hal ini sehubungan dengan data dan informasi yang tersedia.

Dalam memenuhi maksud tersebut di atas ada beberapa macam informasi yang dibutuhkan yang tersedia pada data SP 1971, SP 1980, SP 1990, SP 2000, SUPAS 1976, SUPAS 1985, SUPAS 1995 dan SUPAS 2005. Informasi tersebut adalah keterangan tentang provinsi tempat lahir untuk migrasi seumur hidup dan keterangan tentang provinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu untuk studi migrasi risen. Pola migrasi yang akan disampaikan tidak termasuk dengan hasil SP 2010. Hasil dari SP 2010 baru terbatas pada data agregat per provinsi, belum sampai pada karakteristik individu yang lebih detil karena sampai tulisan ini dibuat proses pengolahan data SP 2010 sedang berlangsung.

II. KEADAAN PENDUDUK 1971 - 2005

Dalam demografi ada tiga fenomena yang merupakan bagian penting dari penduduk yaitu dinamika kependudukan (*change in population*), komposisi penduduk (*population composition*), serta besar dan persebaran penduduk (*size and population distribution*). Dalam pembahasan keadaan penduduk kali ini terbatas pada komposisi dan persebaran penduduk.

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Contoh pengelompokan penduduk, antara lain adalah berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk sangat berguna untuk berbagai maksud dan tujuan seperti untuk mengetahui sumber daya manusia yang ada yang selanjutnya diperlukan dalam suatu negara sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk digunakan sebagai perencanaan pembangunan kependudukan sehingga dinamika penduduk bisa terdeteksi.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan variabel yang sangat penting dalam demografi. Hal ini disebabkan dalam setiap pembahasan tentang masalah penduduk melibatkan variabel umur dan jenis kelamin. Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Struktur ini mempunyai pengaruh yang penting baik terhadap tingkah laku geografis maupun sosial ekonomi.

2.1 Komposisi Penduduk menurut Umur

Komposisi penduduk menurut umur disebut juga struktur penduduk. Struktur ini membagi umur penduduk dalam beberapa kelompok umur dengan interval tertentu. Setiap kelompok umur umumnya memiliki jarak antar umur 5 tahun. Misalnya 0-4, 5-9, 10-14, ... , 60-64, dan 65 tahun ke atas.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, selanjutnya struktur penduduk dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut:

- 1) Umur 0-14 tahun dinamakan usia muda (usia belum produktif).
- 2) Umur 15-64 tahun dinamakan usia dewasa (usia produktif atau usia kerja).
- 3) Umur 65 tahun dan lebih dinamakan usia tua (usia tidak produktif).

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang tergolong dalam usia muda (0-14 tahun) adalah yang paling banyak. Sementara jumlah penduduk yang tergolong usia tua (65 tahun ke atas) adalah yang paling sedikit terutama pada periode 1971 sampai 1976. Hal ini terjadi karena pada periode tahun 1971 sampai 1976 tingkat kelahirannya masih cukup tinggi, sementara tingkat kematian pada usia tua juga cukup tinggi. Sehingga jumlah penduduk pada kelompok usia muda tinggi sementara pada kelompok usia tuanya rendah. Dengan demikian rasio ketergantungan (*dependency ratio*) pada periode 1971-1976 ini cukup tinggi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan penduduk pada usia belum produktif dan non produktif terhadap penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk usia produktif harus menanggung banyak penduduk yang tidak/belum produktif.

Mulai tahun 1980 jumlah penduduk yang tergolong dalam usia produktif (15-64 tahun) mulai meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan jumlah penduduk pada kelompok usia produktif ini terus menunjukkan peningkatan sampai pada tahun 2005. Jumlah penduduk pada usia tua (65 tahun ke atas) juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1985 jumlah penduduk pada kelompok umur 75 ke atas hanya kurang dari 1,7 juta, kemudian pada tahun 1990 jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut telah di atas 1,9 juta. Sementara itu, mulai dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2005 jumlah penduduk pada kelompok umur 75 ke atas adalah di atas 2 juta orang. Hal ini berarti tingkat kesehatan penduduk terus mengalami perbaikan sehingga tingkat kelahiran dan tingkat kematian termasuk tingkat kematian anak dan kematian pada usia tua dapat diturunkan.

Tabel 2.1
Penduduk menurut Kelompok Umur, 1971-2005

Kelompok Umur	Tahun			
	1971	1976	1980	1985
0 - 4	19.098.693	18.930.303	21.049.945	21.443.695
5 - 9	18.762.081	18.295.920	21.267.168	22.045.483
10 - 14	14.179.537	15.858.626	17.688.924	20.818.154
15 - 19	11.325.493	13.530.231	15.427.986	16.500.166
20 - 24	8.031.271	9.882.024	12.902.969	14.232.641
25 - 29	8.924.886	8.281.979	11.234.730	13.757.362
30 - 34	7.903.558	7.690.415	8.090.022	10.613.209
35 - 39	7.979.114	8.058.501	8.466.657	9.205.488
40 - 44	6.101.789	6.358.513	7.421.747	7.749.903
45 - 49	4.649.626	5.586.465	6.165.142	7.117.520
50 - 54	3.863.832	4.272.766	5.426.318	5.768.308
55 - 59	2.226.037	3.172.968	3.413.029	4.739.971
60 - 64	2.338.497	2.506.552	3.278.116	3.855.318
65 - 69	1.142.956	1.472.448	1.764.291	2.265.999
70 - 74	1.038.563	1.124.501	1.572.234	1.652.362
75 +	786.858	1.027.814	1.576.490	1.643.417
T.T.	15.059	43.155	30.705	7.316
Jumlah/Total	118.367.850	126.093.181	146.776.473	163.416.312

Kelompok Umur	Tahun			
	1990	1995	2000	2005
0 - 4	20.850.755	20.312.228	20.302.376	19.497.614
5 - 9	23.115.885	21.656.919	20.494.091	22.002.703
10 - 14	21.413.338	23.614.247	20.453.732	21.757.828
15 - 19	18.853.552	20.213.459	21.149.517	20.241.554
20 - 24	16.058.211	17.085.849	19.258.101	19.837.499
25 - 29	15.554.926	16.230.996	18.640.937	19.035.298
30 - 34	13.189.947	14.920.984	16.399.720	17.719.498
35 - 39	11.142.220	14.063.206	14.904.226	16.730.560
40 - 44	8.047.711	11.062.741	12.467.848	14.714.363
45 - 49	7.536.579	8.216.599	9.656.005	12.575.769
50 - 54	6.665.529	7.096.658	7.384.968	10.092.707
55 - 59	4.816.677	6.171.568	5.678.664	7.360.099
60 - 64	4.514.427	5.167.875	5.321.019	5.705.785
65 - 69	2.742.563	3.547.682	3.564.926	4.174.629
70 - 74	2.024.558	2.444.863	2.837.037	3.034.383
75 +	1.968.957	2.109.215	2.716.985	2.864.830
T.T.	4.391		11.847	1.021
Jumlah/Total	178.500.226	193.915.089	201.241.999	217.346.140

Struktur penduduk antara wilayah satu dengan yang lain berbeda-beda. Negara maju mempunyai struktur penduduk yang berbeda dengan negara yang sedang berkembang. Demikian pula struktur wilayah perkotaan akan berbeda dengan struktur penduduk wilayah pedesaan. Hal tersebut bisa terjadi karena dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiga variabel tersebut saling berpengaruh satu dengan yang lain, jika salah satu berubah maka variabel yang lain juga ikut berubah. Faktor sosial ekonomi suatu wilayah akan mempengaruhi struktur umur wilayah bersangkutan. Berdasarkan ketiga variabel demografi tersebut dan dengan melihat komposisi umur penduduknya untuk kelompok usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun, maka kita dapat menentukan apakah suatu penduduk tergolong 'penduduk tua' atau 'penduduk muda'.

a. Struktur Penduduk Muda

Apabila persentase penduduk yang berusia 14 tahun ke bawah di atas 40 persen, sedangkan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas di bawah 5 persen maka struktur penduduknya adalah struktur penduduk muda. Contoh negara yang mempunyai struktur penduduk muda antara lain Indonesia, India, dan Bangladesh. Dengan demikian struktur penduduk muda biasanya terjadi di negara-negara berkembang.

b. Struktur Penduduk Tua

Apabila persentase penduduk yang berusia 14 tahun ke bawah lebih kecil/kurang dari 30 persen, sedangkan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas lebih dari 10 persen maka struktur penduduknya adalah struktur penduduk tua. Struktur penduduk tua ini biasa terjadi di negara-negara maju, misalnya adalah negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang.

Dengan melihat komposisi umur penduduknya untuk kelompok usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun pada Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa penduduk Indonesia masih tergolong struktur penduduk muda. Persentase penduduk usia muda (0-14 tahun) pada periode tahun 1971-1980 adalah di atas 40 persen. Namun persentase penduduk usia muda ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 1985 hingga tahun 2005 persentase penduduk usia muda ini sudah di bawah 40 persen. Bahkan pada tahun 2005 persentase penduduk usia muda sudah di bawah 30 persen. Sementara itu, persentase penduduk usia tua

(65 tahun ke atas) dari tahun 1971 sampai tahun 2005 masih di bawah 5 persen, akan tetapi persentasenya terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 4,63 persen pada tahun 2005.

Tabel 2.2
Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur, 1971-2005

Kelompok Umur	Tahun							
	1971	1976	1980	1985	1990	1995	2000	2005
0-14	43,97	42,11	40,89	39,36	36,63	33,82	30,44	29,11
15-64	53,52	55,01	55,76	57,24	59,60	62,00	65,03	66,26
65+	2,51	2,88	3,35	3,40	3,77	4,18	4,53	4,63

2.2 Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin

Dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1995 secara keseluruhan, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki atau rasio jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan selalu kurang dari satu. Baru pada tahun 2000 dan tahun 2005, jumlah penduduk laki-laki secara keseluruhannya lebih banyak daripada penduduk perempuan. Padahal pada setiap tahunnya mulai dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2005, kelahiran bayi laki-laki selalu lebih banyak daripada kelahiran bayi perempuan. Hal ini dapat diketahui dengan melihat jumlah penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun. Pada kelompok usia muda (0-14 tahun), jumlah penduduk laki-laki juga lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebelum tahun 2000 (periode 1971-1995), jumlah penduduk laki-laki selalu lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini kemungkinan terjadi karena banyak penduduk laki-laki pada kelompok usia produktif tersebut melakukan migrasi sehingga tidak tercacah atau terjadi '*undercoverage*'. Selain itu laki-laki pada usia produktif tersebut banyak yang bekerja pada pekerjaan yang memiliki risiko kematian lebih tinggi daripada perempuan, karena laki-laki menurut budaya di Indonesia memiliki tanggungjawab lebih besar untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan pada tahun 2000 dan 2005, jumlah penduduk laki-laki pada kelompok usia produktif lebih banyak dibandingkan perempuan.

Berikutnya pada penduduk usia tua (65 tahun ke atas) jumlah penduduk laki-laki selalu lebih kecil dibandingkan perempuan. Berkaitan dengan hal di atas dapat dilihat bahwa angka harapan hidup perempuan memang lebih tinggi daripada angka harapan hidup laki-laki. Hal ini disebabkan pekerjaan laki-laki pada umumnya lebih berat dan lebih tinggi resiko kematiannya dibandingkan dengan perempuan. Selain itu juga disebabkan oleh faktor biologis dimana perempuan memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik daripada laki-laki.

Tabel 2.3
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 1971-2005

Kelompok Umur	Tahun							
	1971		1976		1980		1985	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
0 - 4	9.606.158	9.492.535	9.620.945	9.309.358	10.815.974	10.374.698	10.955.314	10.488.381
5 - 9	9.525.224	9.236.857	9.309.369	8.986.551	10.832.383	10.399.544	11.343.729	10.701.754
10 - 14	7.353.370	6.826.167	8.104.019	7.754.607	9.131.871	8.487.163	10.738.248	10.079.906
15 - 19	5.587.606	5.737.887	6.592.412	6.937.819	7.512.541	7.770.694	8.295.975	8.204.191
20 - 24	3.601.830	4.429.441	4.771.069	5.110.955	5.978.576	7.022.969	6.359.801	7.872.840
25 - 29	3.977.739	4.947.147	3.853.012	4.428.967	5.612.684	5.730.862	6.519.441	7.237.921
30 - 34	3.689.877	4.213.681	3.645.871	4.044.544	4.022.625	4.144.456	5.460.217	5.152.992
35 - 39	3.947.886	4.031.228	3.884.800	4.173.701	4.190.944	4.358.927	4.637.458	4.568.030
40 - 44	3.063.990	3.037.799	3.148.332	3.210.181	3.644.053	3.775.910	3.865.441	3.884.462
45 - 49	2.426.868	2.222.758	2.875.215	2.711.250	3.012.756	3.137.481	3.574.184	3.543.336
50 - 54	1.902.778	1.961.054	2.080.599	2.192.167	2.717.883	2.692.259	2.817.749	2.950.559
55 - 59	1.126.094	1.099.943	1.582.616	1.590.352	1.720.501	1.669.778	2.265.237	2.474.734
60 - 64	1.082.325	1.256.172	1.188.813	1.317.739	1.559.230	1.669.397	1.871.497	1.983.821
65 - 69	549.263	593.693	677.012	795.436	811.113	902.772	1.125.220	1.140.779
70 - 74	510.180	528.383	513.347	611.154	689.074	841.584	760.732	891.630
75 +	380.399	406.459	481.437	546.377	688.422	836.951	727.205	916.212
T.T.	7.057	8.002	28.415	14.740	11.040	9.358	3.997	3.319
Total	58.338.644	60.029.206	62.357.283	63.735.898	72.951.670	73.824.803	81.321.445	82.094.867

Tabel 2.3 – Sambungan

Kelompok Umur	Tahun							
	1990		1995		2000		2005	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
0 - 4	10.691.849	10.158.906	10.403.652	9.908.576	10.295.701	10.006.675	9.935.278	9.562.336
5 - 9	11.872.166	11.243.719	11.062.397	10.594.522	10.433.865	10.060.226	11.315.096	10.687.607
10 - 14	11.006.592	10.406.746	11.990.616	11.623.631	10.460.908	9.992.824	11.188.961	10.568.867
15 - 19	9.481.050	9.372.502	10.237.873	9.975.586	10.649.348	10.500.169	10.326.045	9.915.509
20 - 24	7.547.951	8.510.260	8.005.950	9.079.899	9.237.464	10.020.637	9.722.949	10.114.550
25 - 29	7.422.919	8.132.007	7.759.193	8.471.803	9.130.504	9.510.433	9.244.929	9.790.369
30 - 34	6.555.776	6.634.171	7.231.786	7.689.198	8.204.302	8.195.418	8.688.411	9.031.087
35 - 39	5.766.415	5.375.805	7.023.985	7.039.221	7.432.840	7.471.386	8.323.980	8.406.580
40 - 44	3.993.870	4.053.841	5.798.016	5.264.725	6.433.438	6.034.410	7.385.205	7.329.158
45 - 49	3.708.746	3.827.833	4.154.930	4.061.669	5.087.252	4.568.753	6.402.209	6.173.560
50 - 54	3.277.391	3.388.138	3.766.237	3.330.421	3.791.185	3.593.783	5.254.053	4.838.654
55 - 59	2.313.978	2.502.699	2.922.951	3.248.617	2.883.226	2.795.438	3.805.216	3.554.883
60 - 64	2.213.116	2.301.311	2.294.038	2.873.837	2.597.076	2.723.943	2.794.170	2.911.615
65 - 69	1.325.310	1.417.253	1.693.868	1.853.814	1.666.191	1.898.735	1.986.697	2.187.932
70 - 74	943.836	1.080.722	1.189.371	1.255.492	1.368.190	1.468.847	1.467.434	1.566.949
75 +	865.746	1.103.211	968.189	1.141.026	1.257.526	1.459.459	1.405.699	1.459.131
T.T.	2.205	2.186			5.946	5.901	426	595
Total	88.988.916	89.511.310	96.503.052	97.412.037	100.934.962	100.307.037	109.246.758	108.099.382

Penggambaran komposisi penduduk biasanya diwujudkan dalam piramida penduduk. Jadi piramida penduduk merupakan gambaran dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang dituangkan dalam bentuk grafik. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin yang digambarkan dalam piramida penduduk ini, dapat menjelaskan karakteristik penduduk dalam suatu wilayah. Piramida penduduk menyajikan data kependudukan dalam bentuk diagram batang yang tersusun dari garis atau koordinat vertikal yang digunakan untuk menyatakan golongan umur dan garis horizontal yang menunjukkan jumlah. Jenis kelamin laki-laki di sebelah kiri sedangkan perempuan di sebelah kanan.

Karakteristik penduduk di suatu negara yang dapat dijelaskan dengan menggunakan piramida penduduk meliputi ekspansif, konstruktif dan stasioner.

a. Piramida Penduduk Muda (*Expansive*)

Suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah sehingga daerah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Piramida ini dicirikan dengan sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok umur muda. Contohnya adalah negara-negara yang sedang berkembang, misalnya Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India.

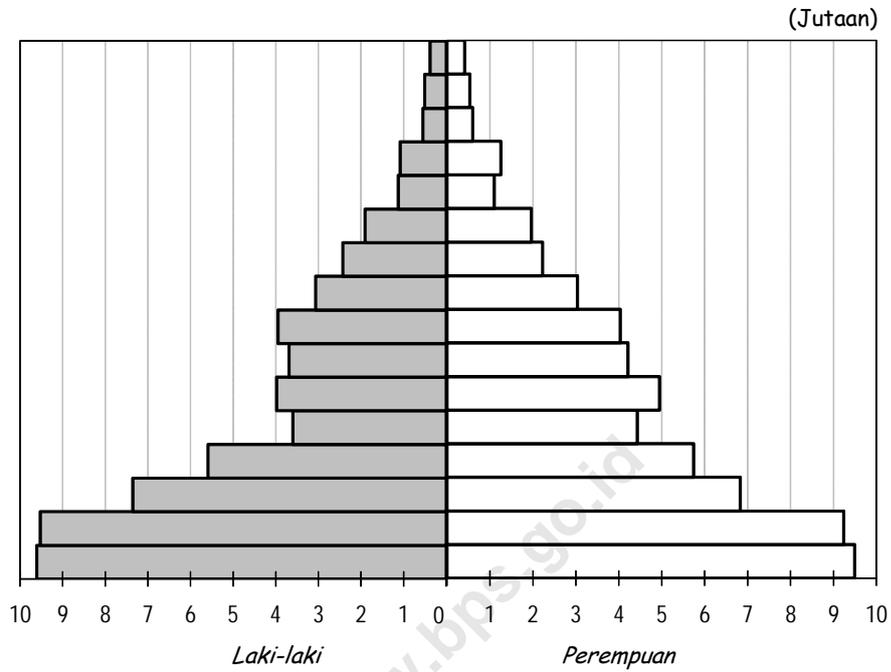
b. Piramida Penduduk Stasioner

Suatu wilayah memiliki angka kelahiran dan angka kematian yang sama-sama rendah (seimbang). Contohnya adalah negara-negara Eropa Barat.

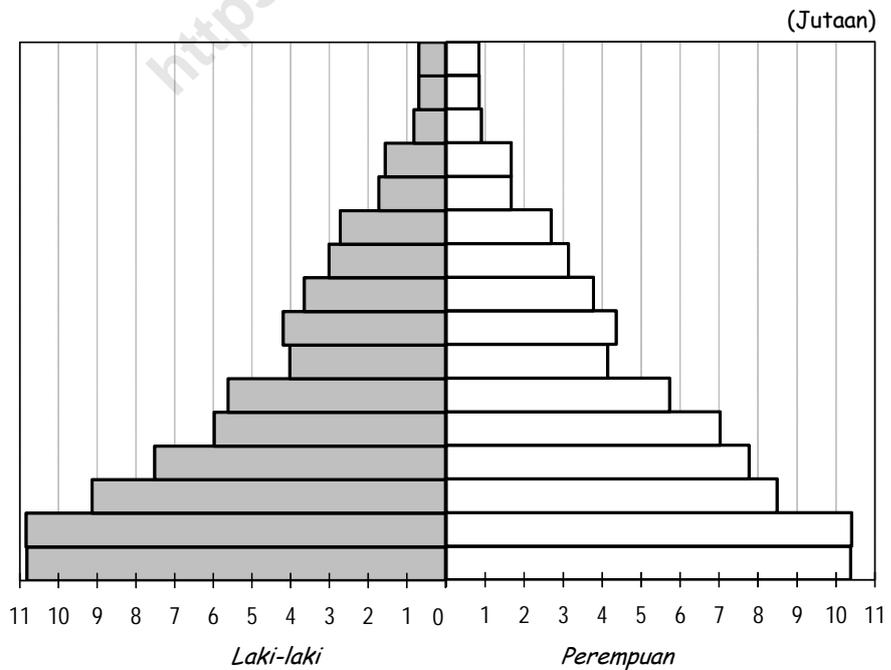
c. Piramida Penduduk Tua (*Constructive*)

Suatu wilayah memiliki angka kelahiran yang menurun dengan cepat dan tingkat kematian yang rendah. Piramida ini juga dicirikan dengan jumlah kelompok umur muda lebih sedikit dibanding kelompok umur tua. Contohnya adalah negara-negara yang sudah maju, misalnya Amerika Serikat.

Gambar 2.1
Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1971



Gambar 2.2
Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1980

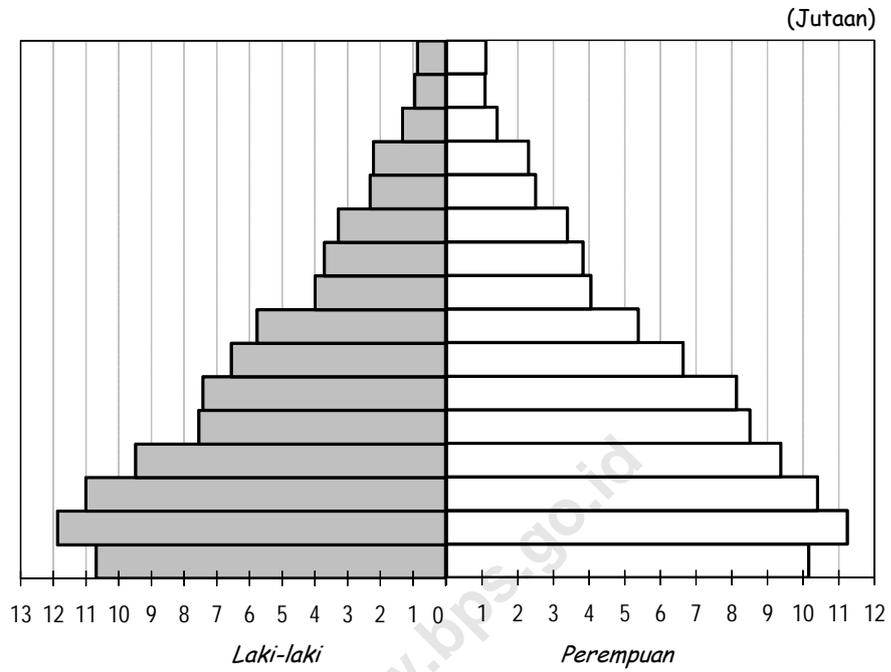


Pada piramida penduduk Indonesia tahun 1971 yang disajikan pada Gambar 2.1 dapat dilihat dasar piramida yang melebar baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Indonesia pada tahun ini masih cukup tinggi. Kemiringan (*slope*) piramida yang tidak terlalu curam/datar menunjukkan masih sangat tingginya tingkat kematian (LDFEUI, 2004). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1971 tingkat kelahiran dan tingkat kematiannya masih sangat tinggi yang menunjukkan belum berhasilnya upaya pengendalian kelahiran dan kematian.

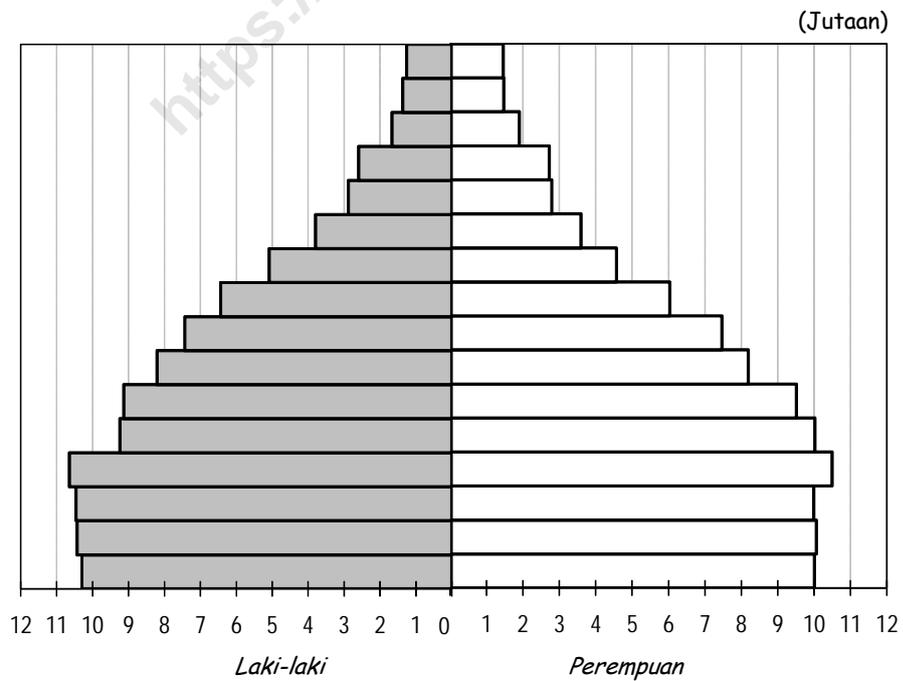
Untuk kelompok umur tertentu terlihat jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan bagi penduduk pada usia reproduksi (*child bearing age*), ternyata jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Tingginya jumlah perempuan pada usia subur tersebut akan mengakibatkan tingginya tingkat kelahiran pada tahun-tahun berikutnya apabila tidak dikendalikan. Pada kelompok umur tertentu (misalnya 20-24, 25-29, dan 30-34 tahun) terdapat lekukan-lekukan yang disebabkan oleh angka kematian yang relatif masih tinggi dan keadaan pada waktu mereka lahir adalah dalam suasana peperangan revolusi fisik sekitar tahun 1950-an. Pada saat itu, pemerintah Indonesia sedang fokus pada persiapan pemerintahan yang baru merdeka sehingga perhatian pada bidang kesehatan masih kurang.

Dari piramida penduduk tahun 1980 pada Gambar 2.2 dapat dicermati bahwa dasar piramida atau jumlah kelompok usia termuda (0-4 tahun) hampir sama dengan jumlah penduduk pada kelompok usia di atasnya (5-9 tahun) yang berarti bahwa tingkat kelahiran sudah dikendalikan. Pengendalian tingkat kelahiran ini dilakukan melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Kemudian slope piramida pada tahun 1980 ini juga lebih curam dari tahun-tahun sebelumnya yang berarti tingkat kematian juga mengalami penurunan. Perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan pada setiap kelompok umur juga hampir sama terlihat dari piramida yang nampak simetris.

Gambar 2.3
Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1990



Gambar 2.4
Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2000



Piramida penduduk tahun 1990 menunjukkan terjadinya penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian dari tahun sebelumnya seperti terpapar pada Gambar 2.3. Namun besarnya jumlah penduduk usia muda dan menurunnya tingkat kematian pada usia tua mengindikasikan tingginya beban rasio ketergantungan (*dependency ratio*) pada tahun ini.

Bentuk piramida penduduk pada tahun 2000 pada Gambar 2.4 hampir menyerupai bentuk sarang tawon kuno (*old fashioned beehive*), meskipun belum sepenuhnya. Jumlah penduduk pada kelompok usia muda masih cukup banyak dan hampir sama pada tiap kelompok umur yaitu pada kelompok umur 0-4, 5-9, dan 10-14 tahun. Bentuk piramida ini menunjukkan tingkat kelahiran yang telah cukup rendah begitu pula tingkat kematiannya. Sementara itu, rasio ketergantungannya juga telah menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena jumlah penduduk pada usia produktif cukup banyak. Bentuk piramida ini adalah yang paling baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2.3 Komposisi Penduduk menurut Kota Desa

Sebelum melakukan analisa perlu diperhatikan bahwa dari Tabel 2.4 yaitu penduduk menurut daerah perkotaan/perdesaan khusus pada tahun 2005 tidak dapat dilakukan perbandingan penduduk perkotaan/perdesaan secara nasional/keseluruhan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2005, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak termasuk dalam cakupan SUPAS 2005. Pendataan di provinsi NAD pada tahun 2005 diperoleh melalui Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN). Namun untuk provinsi-provinsi selain NAD yang datanya berasal dari SUPAS 2005 masih dapat dibandingkan dengan kondisi dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu untuk perbandingan antar provinsi perlu diperhatikan bahwa beberapa provinsi telah dipecah pada tahun tertentu atau masih tergabung pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya provinsi Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, dan Maluku Utara yang pada tahun 2000 sudah berdiri sebagai provinsi tersendiri, serta provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2005.

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan terus mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari 20,5 juta orang pada tahun 1971, menjadi 32,8 juta orang pada tahun 1980, hingga naik hampir tiga kali lipat (92,0 juta orang)

pada tahun 2005. Sementara itu jumlah penduduk perdesaan pertumbuhannya lambat bahkan sempat mengalami penurunan dari 124,1 juta orang pada tahun 1995 menjadi 115,9 juta orang pada tahun 2000.

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat ini terjadi baik karena perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan, perubahan status dari perdesaan menjadi perkotaan, maupun karena pertumbuhan alami penduduk perkotaan tersebut. Perpindahan penduduk perdesaan ke perkotaan ini terutama terjadi karena daya tarik daerah perkotaan yang lebih kuat seperti dalam hal penyediaan berbagai jenis lapangan pekerjaan, fasilitas sarana prasarana yang jauh lebih lengkap dari perdesaan, dan lain-lain. Perubahan status daerah dari perdesaan menjadi perkotaan contoh yang jelas adalah di provinsi DKI Jakarta dimana mulai tahun 1990 sudah tidak ada lagi wilayah yang dikategorikan sebagai perdesaan. Melalui berbagai macam program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan membangun berbagai macam sarana prasarana diberbagai wilayah maka suatu daerah yang tadinya termasuk dalam kategori perdesaan dapat berubah menjadi perkotaan. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat ini terutama terlihat pada provinsi-provinsi di pulau Jawa.

Tabel 2.4
Penduduk Menurut Daerah Perkotaan/Perdesaan, 1971-2005

Provinsi	1971		1980		1985	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
NAD	169.497	1.838.844	233.501	2.377.027	294.228	2.677.959
Sumatera Utara	1.135.625	5.485.186	2.127.436	6.223.514	2.790.641	6.631.496
Sumatera Barat	479.302	2.312.919	433.120	2.973.012	520.762	3.177.362
Riau	217.893	1.423.181	588.212	1.575.684	737.618	1.810.643
Jambi	292.578	713.080	182.846	1.261.630	294.503	1.450.169
Sumatera Selatan	928.351	2.509.710	1.267.009	3.360.710	1.524.737	3.845.135
Bengkulu	60.938	458.378	72.422	695.566	103.399	839.808
Lampung	272.935	2.502.760	576.872	4.047.366	849.972	5.055.592
Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	4.546.492	-	6.071.748	408.906	7.148.942	736.577
Jawa Barat	2.683.123	18.937.827	5.770.868	21.678.972	8.277.861	22.552.504
Jawa Tengah	2.345.190	19.520.073	4.756.007	20.611.337	6.869.819	20.075.209
DI Yogyakarta	406.337	2.082.207	607.267	2.142.861	764.736	2.165.573
Jawa Timur	3.694.311	21.814.076	5.720.487	23.448.517	7.255.469	24.006.122
Banten	-	-	-	-	-	-
Bali	208.047	1.912.044	363.336	2.106.388	488.144	2.161.257
Nusa Tenggara Barat	178.648	2.024.787	383.421	2.340.257	540.954	2.453.764
Nusa Tenggara Timur	129.449	2.165.830	205.467	2.531.521	269.884	2.791.360
Kalimantan Barat	222.635	1.797.289	416.923	2.067.968	552.853	2.266.643
Kalimantan Tengah	86.757	615.179	98.257	855.919	157.194	960.687
Kalimantan Selatan	452.873	1.246.232	440.901	1.622.326	505.113	1.767.510
Kalimantan Timur	286.429	445.177	485.219	729.383	631.938	879.727
Sulawesi Utara	334.950	1.382.721	354.607	1.760.215	427.718	1.884.908
Sulawesi Tengah	51.698	861.964	115.472	1.169.056	140.634	1.370.323
Sulawesi Selatan	940.657	4.239.254	1.096.075	4.963.489	1.258.239	5.351.369
Sulawesi Tenggara	45.225	668.895	88.036	853.598	109.161	1.010.565
Gorontalo	-	-	-	-	-	-
Maluku	144.651	944.860	152.944	1.255.507	203.282	1.405.276
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
Papua	150.786	-	237.316	869.975	311.725	1.059.248
Indonesia	20.465.377	97.902.473	32.845.769	113.930.704	43.029.526	120.386.786

Tabel 2.4 – Sambungan

Provinsi	1990		1995		2000		2005	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
NAD	540.040	2.875.634	790.442	3.057.141	485.555	1.249.167	-	-
Sumatera Utara	3.638.832	6.613.479	4.567.534	6.547.133	4.906.416	6.600.392	5.360.009	6.328.978
Sumatera Barat	808.642	3.191.122	1.083.408	3.239.762	1.227.113	3.014.492	1.363.036	3.192.774
Riau	1.046.441	2.232.366	1.340.153	2.560.381	2.058.952	2.696.224	1.669.769	2.893.637
Jambi	432.605	1.585.858	643.633	1.726.326	681.852	1.725.314	714.316	1.912.900
Sumatera Selatan	1.852.035	4.459.923	2.184.831	5.022.714	2.362.790	4.494.586	2.268.875	4.498.770
Bengkulu	240.192	938.759	362.283	1.046.834	459.627	1.102.458	439.747	1.106.539
Lampung	748.318	5.267.485	1.046.152	5.611.607	1.411.415	5.237.766	1.490.170	5.614.402
Bangka Belitung	-	-	-	-	386.793	512.302	426.982	615.846
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	1.010.587	262.424
DKI Jakarta	8.227.746	-	9.112.652	-	8.347.083	-	8.839.247	-
Jawa Barat	12.209.715	23.171.967	16.737.826	22.468.961	17.971.472	17.752.001	20.051.392	18.835.583
Jawa Tengah	7.693.490	20.822.247	9.459.680	20.193.586	12.428.082	18.496.082	12.903.891	18.992.223
DI Yogyakarta	1.294.056	1.618.555	1.693.284	1.223.495	1.798.513	1.321.965	1.973.631	1.363.464
Jawa Timur	8.916.617	23.571.127	10.850.400	22.993.602	14.211.229	20.554.769	14.726.139	21.331.968
Banten	-	-	-	-	4.224.362	3.872.447	4.752.033	4.256.118
Bali	734.237	2.043.119	993.610	1.902.039	1.565.337	1.581.662	1.712.793	1.665.299
NTB	576.912	2.791.787	687.172	2.958.541	1.343.934	2.486.663	1.471.270	2.698.425
NTT	372.242	2.895.677	496.714	3.080.758	588.664	3.219.813	662.114	3.581.068
Kalimantan Barat	644.529	2.583.544	787.671	2.848.059	985.140	2.747.810	1.088.369	2.954.448
Kalimantan Tengah	245.249	1.150.764	365.770	1.261.683	506.834	1.294.172	553.081	1.359.945
Kalimantan Selatan	702.950	1.893.697	866.946	2.026.531	1.077.867	1.897.847	1.245.481	2.025.932
Kalimantan Timur	915.469	959.563	1.162.199	1.151.984	1.411.014	1.032.320	1.603.799	1.237.075
Sulawesi Utara	564.565	1.912.624	696.256	1.952.837	723.033	1.250.407	792.061	1.328.956
Sulawesi Tengah	281.134	1.422.196	423.917	1.514.154	402.125	1.610.268	457.562	1.833.407
Sulawesi Selatan	1.712.258	5.268.331	2.136.511	5.421.857	2.311.132	5.490.546	2.550.477	5.906.646
Sulawesi Tenggara	229.649	1.119.649	355.159	1.231.758	373.848	1.402.444	427.165	1.533.532
Gorontalo	-	-	-	-	211.913	618.271	239.555	680.460
Maluku	352.437	1.500.286	512.754	1.573.762	289.959	859.940	358.806	890.406
Maluku Utara	-	-	-	-	205.691	464.142	215.989	665.878
Papua	395.209	1.234.898	500.328	1.442.299	422.882	1.275.102	636.723	1.803.115
Indonesia	55.375.569	123.124.657	69.857.285	124.057.804	85.380.627	115.861.372	92.005.069	121.370.218

2.4 Komposisi Penduduk menurut Provinsi

Berdasarkan komposisi penduduk menurut provinsi jelas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Penyebab utamanya adalah pesatnya pembangunan yang juga terkonsentrasi di pulau Jawa. Ketidakmerataan penduduk ini juga mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan baik fisik maupun mental. Hal ini selanjutnya mengakibatkan keinginan untuk pindah menjadi tinggi, dimana banyak penduduk yang tinggal di luar pulau Jawa bermigrasi dan menetap di pulau Jawa. Ketidakmerataan persebaran penduduk juga mengakibatkan kelebihan penduduk di pulau Jawa (kepadatan) dan kekurangan penduduk (sumber daya manusia) di pulau-pulau selain Jawa. Akan tetapi terdapat penurunan jumlah penduduk di DKI Jakarta dan Jawa Barat dari tahun 1995 ke tahun 2000 yang kemungkinan disebabkan persebaran penduduknya mulai keluar dari wilayah ini.

Sementara itu yang perlu menjadi catatan dalam melihat komposisi penduduk menurut provinsi ini adalah adanya beberapa provinsi yang sebelumnya masih tergabung dengan provinsi induknya, seperti Bangka Belitung yang masih tergabung dengan Sumatera Selatan, Kepulauan Riau tergabung dengan Riau, Banten tergabung dengan Jawa Barat, Gorontalo tergabung dengan Sulawesi Utara, dan Maluku Utara tergabung dengan Maluku.

Tabel 2.5
Penduduk menurut Provinsi, 1971-2005

Provinsi	Tahun						
	1971	1980	1985	1990	1995	2000	2005
NAD	2.008.341	2.610.528	2.972.187	3.415.674	3.847.583	1.734.722	3.970.853
Sumatera Utara	6.620.811	8.350.950	9.422.137	10.252.311	11.114.667	11.506.808	11.688.987
Sumatera Barat	2.792.221	3.406.132	3.698.124	3.999.764	4.323.170	4.241.605	4.555.810
Riau	1.641.074	2.163.896	2.548.261	3.278.807	3.900.534	4.755.176	4.563.406
Jambi	1.005.658	1.444.476	1.744.672	2.018.463	2.369.959	2.407.166	2.627.216
Sumatera Selatan	3.438.061	4.627.719	5.369.872	6.311.958	7.207.545	6.857.376	6.767.645
Bengkulu	519.316	767.988	943.207	1.178.951	1.409.117	1.562.085	1.546.286
Lampung	2.775.695	4.624.238	5.905.564	6.015.803	6.657.759	6.649.181	7.104.572
Bangka Belitung	-	-	-	-	-	899.095	1.042.828
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	1.273.011
DKI Jakarta	4.546.492	6.480.654	7.885.519	8.227.746	9.112.652	8.347.083	8.839.247
Jawa Barat	21.620.950	27.449.840	30.830.365	35.381.682	39.206.787	35.723.473	38.886.975
Jawa Tengah	21.865.263	25.367.344	26.945.028	28.515.737	29.653.266	30.924.164	31.896.114
DI Yogyakarta	2.488.544	2.750.128	2.930.309	2.912.611	2.916.779	3.120.478	3.337.095
Jawa Timur	25.508.387	29.169.004	31.261.591	32.487.744	33.844.002	34.765.998	36.058.107
Banten	-	-	-	-	-	8.096.809	9.008.151
Bali	2.120.091	2.469.724	2.649.401	2.777.356	2.895.649	3.146.999	3.378.092
NTB	2.203.435	2.723.678	2.994.718	3.368.699	3.645.713	3.830.597	4.169.695
NTT	2.295.279	2.736.988	3.061.244	3.267.919	3.577.472	3.808.477	4.243.182
Kalimantan Barat	2.019.924	2.484.891	2.819.496	3.228.073	3.635.730	3.732.950	4.042.817
Kalimantan Tengah	701.936	954.176	1.117.881	1.396.013	1.627.453	1.801.006	1.913.026
Kalimantan Selatan	1.699.105	2.063.227	2.272.623	2.596.647	2.893.477	2.975.714	3.271.413
Kalimantan Timur	731.606	1.214.602	1.511.665	1.875.032	2.314.183	2.443.334	2.840.874
Sulawesi Utara	1.717.671	2.114.822	2.312.626	2.477.189	2.649.093	1.973.440	2.121.017
Sulawesi Tengah	913.662	1.284.528	1.510.957	1.703.330	1.938.071	2.012.393	2.290.969
Sulawesi Selatan	5.179.911	6.059.564	6.609.608	6.980.589	7.558.368	7.801.678	8.457.123
Sulawesi Tenggara	714.120	941.634	1.119.726	1.349.298	1.586.917	1.776.292	1.960.697
Gorontalo	-	-	-	-	-	830.184	920.015
Maluku	1.089.511	1.408.451	1.608.558	1.852.723	2.086.516	1.149.899	1.249.212
Maluku Utara	-	-	-	-	-	669.833	881.867
Papua	150.786	1.107.291	1.370.973	1.630.107	1.942.627	1.697.984	2.439.838
Indonesia	118.367.850	146.776.473	163.416.312	178.500.226	193.915.089	201.241.999	217.346.140

2.5 Persebaran Kepadatan Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah negara.

Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, disamping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Secara geografis, penduduk Indonesia tersebar di beberapa pulau besar dan pulau-pulau atau kepulauan. Secara administratif, penduduk Indonesia tersebar di 33 provinsi, yang mempunyai lebih dari 440 kabupaten dan kota.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan persebaran penduduk secara geografis sejak dahulu hingga sekarang adalah persebaran atau distribusi penduduk yang tidak merata antara Jawa dan luar Jawa. Penyebab utamanya adalah keadaan tanah dan lingkungan yang kurang mendukung bagi kehidupan penduduk secara layak. Ditambah lagi, dengan kebijakan pembangunan di era orde baru yang terkonsentrasi di pulau Jawa, yang menyebabkan banyak penduduk yang tinggal di luar pulau Jawa bermigrasi dan menetap di pulau Jawa. Padahal, luas wilayah pulau Jawa dan Madura hanya sebagian kecil dari luas wilayah negara Indonesia. Ini menyebabkan kepadatan pulau Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di pulau-pulau lain.

Indikator yang umum dipakai dalam mengukur kepadatan penduduk di suatu wilayah adalah rasio kepadatan penduduk (*density ratio*) yaitu rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun tertentu seperti pada rumus berikut:

$$\text{Rasio Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{)}}$$

Provinsi yang paling padat penduduknya adalah DKI Jakarta, dimana kepadatannya terus meningkat dari tahun ke tahun (1971 sampai 1995), dan sedikit menurun pada tahun 2000. Selanjutnya kepadatan di ibukota ini kembali meningkat pada tahun 2005. Kepadatan penduduk di DKI Jakarta adalah sebesar 6.847,02 pada tahun 1971, yang berarti pada tahun ini setiap kilometer (km) persegi wilayah di DKI Jakarta ditempati oleh sebanyak 6.847 penduduk Jakarta. Kemudian pada tahun 1995 kepadatannya menjadi dua kali lipat dari tahun 1971, yaitu sebanyak 13.724 orang tiap km persegi. Pada tahun 2000, kepadatan penduduk di DKI Jakarta sedikit menurun yakni sebanyak 12.537 orang setiap km persegi. Berikutnya pada tahun 2005, kepadatan penduduk DKI Jakarta adalah 13.312 orang setiap km persegi.

Provinsi yang terpadat kedua masih di pulau Jawa yaitu provinsi DI Yogyakarta pada tahun 1971-1985 dan Jawa Barat pada tahun 1990-2005, selanjutnya diikuti provinsi-provinsi lain di pulau Jawa. Kepadatan penduduk di provinsi-provinsi tersebut jauh berlawanan dengan keadaan di Papua maupun di provinsi Kalimantan Tengah, dimana di Papua hingga tahun 2000 kepadatan penduduknya baru mencapai 2 orang tiap km persegi dan 3 orang tiap km persegi pada tahun 2005. Sementara itu di provinsi Kalimantan Tengah hingga tahun 2005 hanya mencapai 12 orang tiap km persegi.

Ketimpangan kepadatan penduduk pada provinsi-provinsi di Indonesia ini tentu menimbulkan berbagai macam persoalan. Sebagai contoh, timbulnya permukiman kumuh dan kriminalitas yang meningkat pada wilayah yang sudah terlampau padat penduduknya seperti di wilayah DKI Jakarta, maupun permasalahan kekurangan sumber daya manusia untuk dapat mengelola/memajukan wilayahnya sebagaimana terjadi di Papua, dan masih banyak lagi permasalahan lain. Oleh karena itu informasi tentang distribusi penduduk secara geografis dan terkonsentrasinya penduduk di suatu tempat seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.6 sangat diperlukan. Informasi tersebut diperlukan pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk yang umumnya disertai kemiskinan, dengan pembangunan dan program-program untuk mengurangi beban kepadatan penduduk atau melakukan realokasi pembangunan di luar Jawa atau realokasi penduduk untuk bermukim di tempat lain.

Tabel 2.6
Persebaran Kepadatan Penduduk, 1971-2005

Provinsi	Kepadatan per km ²						
	1971	1980	1985	1990	1995	2000	2005
NAD	34,65	45,04	51,28	58,94	66,39	29,93	68,51
Sumatera Utara	90,72	114,43	129,10	140,48	152,29	157,67	160,16
Sumatera Barat	66,46	81,07	88,02	95,20	102,90	100,96	108,44
Riau	18,86	24,87	29,28	37,68	44,82	54,64	52,44
Jambi	20,09	28,86	34,85	40,32	47,34	48,09	52,48
Sumatera Selatan	37,54	50,53	58,63	68,91	78,69	74,87	73,89
Bengkulu	26,07	38,55	47,35	59,19	70,74	78,42	77,63
Lampung	80,17	133,56	170,56	173,75	192,29	192,04	205,19
Bangka Belitung	-	-	-	-	-	54,74	63,49
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	155,21
DKI Jakarta	6.847,02	9.759,87	11.875,60	12.391,00	13.723,67	12.570,72	13.311,92
Jawa Barat	611,15	775,91	871,46	1.000,11	1.108,23	1.009,77	1.099,19
Jawa Tengah	666,61	773,38	821,48	869,36	904,04	942,79	972,42
DI Yogyakarta	794,26	877,75	935,26	929,61	930,94	995,96	1.065,09
Jawa Timur	533,65	610,23	654,01	679,66	708,04	727,33	754,36
Banten	-	-	-	-	-	837,93	932,24
Bali	366,79	427,28	458,37	480,51	500,97	544,46	584,44
NTB	118,64	146,65	161,25	181,38	196,30	206,25	224,51
NTT	47,11	56,18	62,84	67,08	73,43	78,17	87,10
Kalimantan Barat	13,71	16,87	19,14	21,91	24,68	25,34	27,44
Kalimantan Tengah	4,57	6,21	7,28	9,09	10,60	11,73	12,46
Kalimantan Selatan	43,85	53,25	58,66	67,02	74,68	76,80	84,44
Kalimantan Timur	3,58	5,94	7,39	9,17	11,31	11,95	13,89
Sulawesi Utara	124,00	152,68	166,96	178,84	191,25	142,47	153,12
Sulawesi Tengah	14,77	20,77	24,43	27,54	31,34	32,54	37,05
Sulawesi Selatan	81,57	95,42	104,08	109,92	119,02	122,85	133,17
Sulawesi Tenggara	18,76	24,74	29,41	35,44	41,69	46,66	51,51
Gorontalo	-	-	-	-	-	73,75	81,73
Maluku	23,22	30,02	34,29	39,49	44,48	24,51	26,63
Maluku Utara	-	-	-	-	-	20,94	27,57
Papua	0,36	1,39	1,27	2,66	1,71	1,58	3,30
Indonesia	61,94	76,81	85,52	93,41	101,48	105,31	113,74

Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Daya dukung lingkungan pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sehingga setiap satuan luas di pulau Jawa dapat mendukung kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan, misalnya di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan itu ada batasnya. Apabila kemampuan wilayah dalam mendukung lingkungan telah melampaui batasnya, dapat berakibat pada terjadinya tekanan penduduk. Jadi, meskipun di Jawa daya dukung lingkungannya tinggi, namun juga perlu diingat batas kemampuan wilayah tersebut dalam mendukung kehidupan.

<https://www.bps.go.id>

III. POLA MIGRASI MENURUT HASIL SENSUS PENDUDUK

3.1 Pertanyaan Tentang Migrasi di Sensus Penduduk

Sumber data yang digunakan untuk analisa pola migrasi penduduk pada bab ini adalah data hasil Sensus Penduduk (SP). Informasi mengenai migrasi yang digunakan meliputi informasi migrasi yang terdapat pada SP 1971, SP 1980, SP 1990, dan SP 2000. Pertanyaan pokok mengenai migrasi yang selalu ditanyakan pada setiap sensus yaitu tempat tinggal sekarang, tempat lahir, dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Jenis pertanyaan mengenai migrasi pada SP 1971, SP 1980, SP 1990, dan SP 2000 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pertanyaan Tentang Migrasi Penduduk
Pada Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, dan 2000

SP 1971	SP 1980	SP 1990	SP 2000
1. Tempat tinggal sekarang			
2. Provinsi tempat lahir	2. Provinsi tempat lahir	2. Provinsi tempat lahir	2. Provinsi dan kab/kota tempat lahir
3. Lamanya tinggal di provinsi sekarang	3. Lamanya tinggal di provinsi sekarang	3. Lamanya tinggal di provinsi sekarang	3. -
4. Provinsi tempat tinggal terakhir sebelum disini	4. Provinsi tempat tinggal terakhir sebelum disini	4. Provinsi tempat tinggal terakhir sebelum disini	4. -
5. Pernah tinggal di provinsi lain?	5. -	5. -	5. -
6. -	6. Provinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu	6. Provinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu	6. Provinsi dan kab/kota tempat tinggal 5 tahun yang lalu

Dalam SP 1971, SP 1980, dan SP 1990 ada lima pertanyaan yang digunakan untuk penentuan dan penghitungan migrasi yaitu tempat tinggal sekarang, tempat lahir, lama tinggal di tempat tinggal sekarang, tempat tinggal terakhir sebelum tempat tinggal sekarang, dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Sementara pada SP 2000 hanya ada tiga pertanyaan yang dikumpulkan yaitu tempat tinggal sekarang, tempat lahir dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu.

Untuk keterbandingan data dalam analisis pola migrasi ini yang akan dibahas hanya sampai migrasi antar provinsi.

Berdasarkan pertanyaan yang berhubungan dengan migrasi, penduduk yang dicacah dapat digolongkan menjadi migran dan bukan migran. Migran adalah orang yang pernah melakukan migrasi. Pada SP 2000 hanya dapat membedakan antara migran seumur hidup (*life time migrant*) dan migran risen (*recent migrant*), sedangkan pada SP 1971, SP 1980, dan SP 1990 selain dapat membedakan kedua jenis migran di atas juga dapat mengidentifikasi migran total (*total migrant*) karena terdapat informasi mengenai tempat tinggal terakhir sebelum tinggal di tempat tinggal sekarang. Berikut adalah definisi migrasi seumur hidup, migrasi risen dan migrasi total yang akan dibahas selanjutnya pada penulisan buku ini:

- Migrasi seumur hidup adalah migrasi berdasarkan tempat kelahiran tanpa melihat kapan pindahnya. Dalam konsep ini migrasi diperoleh dari keterangan tempat lahir dan tempat tinggal sekarang, jika kedua keterangan ini berbeda maka dikategorikan sebagai migran seumur hidup.
- Migrasi risen adalah migrasi berdasarkan tempat tinggal saat 5 tahun sebelum pencacahan. Keterangan ini diperoleh dari pertanyaan tempat tinggal 5 tahun sebelum pencacahan dan tempat tinggal sekarang. Jika kedua tempat berlainan maka dikategorikan sebagai migran risen.
- Migrasi total adalah migrasi berdasarkan tempat tinggal terakhir sebelum tempat tinggal yang sekarang tanpa melihat kapan pindahnya. Keterangan ini diperoleh dari pertanyaan tempat tinggal terakhir sebelum tinggal di tempat tinggal sekarang dan tempat tinggal sekarang. Jika kedua tempat berlainan maka dikategorikan sebagai migran total.

Informasi lain yang dapat diperoleh dari data sensus adalah angka migrasi masuk, migrasi keluar dan migrasi neto. Angka migrasi masuk adalah banyaknya migran masuk ke suatu pulau/provinsi/kabupaten/kota per 1.000 penduduk pulau/provinsi/kabupaten/kota tersebut. Angka migrasi keluar adalah banyaknya migran keluar dari suatu pulau/provinsi/kabupaten/kota per 1.000 penduduk pulau/provinsi/kabupaten/kota tersebut. Angka migrasi neto adalah

banyaknya migran neto (jumlah migran yang masuk dikurangi jumlah migran yang keluar) per 1.000 penduduk pulau/provinsi/kabupaten/kota tersebut.

3.2 Migrasi Antar Pulau

Pada pembahasan berikut akan dilihat pola migrasi seumur hidup dan pola migrasi risen antar pulau-pulau besar di Indonesia, yaitu pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan gabungan kepulauan lain (Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat). Lebih jauh akan diulas bagaimana pergerakan para migran seumur hidup dan para migran risen berdasarkan data sensus dari SP 1971 sampai SP 2000.

3.2.1 Migrasi Seumur Hidup Antar Pulau

Pada Tabel 3.2 disajikan persentase migran keluar seumur hidup antar pulau dari tahun 1971-2000. Dari tabel tersebut jelas terlihat bahwa untuk migrasi keluar, selama kurun waktu 29 tahun secara absolut pulau Jawa adalah pulau yang paling banyak mengeluarkan migran, yaitu: pada tahun 1971 sebanyak 1,9 juta, tahun 1980 sebanyak 3,6 juta, tahun 1990 sebanyak 5,1 juta, dan tahun 2000 sebanyak 5,4 juta. Di antara migran keluar dari pulau Jawa yang terbesar adalah arus migran ke pulau Sumatera, bahkan sampai tahun 1980 persentasenya mencapai lebih dari 80 persen. Namun mulai tahun 1990, mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 69,73 persen dan pada tahun 2000 persentasenya menurun lagi menjadi 62,55 persen.

Berikutnya pulau Sumatera yang menduduki urutan kedua sebagai pulau pengirim migran. Pada tahun 1971 mempunyai migran keluar sebesar 369 ribu dan pada tahun 1980 naik menjadi 786,4 ribu migran keluar. Selanjutnya mulai tahun 1990 sampai tahun 2000 terjadi peningkatan yang signifikan hingga di atas 1 juta migran keluar, yaitu pada tahun 1990 sebanyak 1,2 juta migran keluar kemudian pada tahun 2000 menjadi 1,7 juta migran keluar. Sebagian besar arus migran keluar dari pulau Sumatera adalah menuju pulau Jawa yaitu 94,31 persen pada tahun 1971, 91,35 persen pada tahun 1980, 90,94 persen pada tahun 1990, dan 91,20 persen pada tahun 2000. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa arus migrasi dari pulau Sumatera ke pulau Jawa boleh dikatakan hampir tidak ada perubahan. Kecenderungan orang Sumatera untuk bermigrasi ke pulau Jawa masih menjadi prioritas utama. Hal ini dapat

dimaklumi karena pulau Sumatera secara geografis berdekatan dengan pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, dan juga karena sistem transportasi yang menghubungkan kedua pulau ini lebih baik dan lancar baik dari segi banyaknya frekuensi maupun jenis angkutan dibandingkan sistem transportasi yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Selain itu kondisi sosial ekonomi dan tingkat pembangunan di pulau Jawa yang lebih baik dari pulau-pulau lainnya juga merupakan daya tarik migran, bukan hanya migran dari pulau Sumatera, tetapi juga migran dari pulau lainnya.

Tabel 3.2
Persentase Migran Keluar Seumur Hidup menurut Pulau Tempat Lahir dan
Pulau Tempat Tinggal Sekarang, 1971-2000

Pulau Tempat Lahir	Tahun	Pulau Tempat Tinggal Sekarang					Migran Keluar	
		Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Kepulauan Lain	%	Jumlah
Sumatera	1971	-	94,31	1,90	2,17	1,62	100,00	369.000
	1980	-	91,35	3,24	2,88	2,53	100,00	786.424
	1990	-	90,94	4,08	2,32	2,66	100,00	1.175.672
	2000	-	91,20	4,56	2,11	2,13	100,00	1.710.861
Jawa	1971	89,66	-	4,65	2,95	2,74	100,00	1.935.000
	1980	81,06	-	10,44	4,67	3,83	100,00	3.584.868
	1990	69,73	-	16,67	6,24	7,36	100,00	5.053.191
	2000	62,55	-	22,02	6,27	9,16	100,00	5.380.889
Kalimantan	1971	17,00	75,00	-	6,00	2,00	100,00	100.000
	1980	12,58	78,19	-	6,26	2,97	100,00	155.785
	1990	9,50	79,95	-	7,28	3,27	100,00	247.594
	2000	8,50	79,47	-	7,77	4,26	100,00	289.520
Sulawesi	1971	34,22	37,26	8,75	-	19,77	100,00	263.000
	1980	26,67	25,08	22,64	-	25,61	100,00	545.189
	1990	14,23	27,33	29,24	-	29,20	100,00	649.718
	2000	14,79	27,35	36,99	-	20,87	100,00	777.450
Kepulauan Lain	1971	25,45	56,36	2,73	15,46	-	100,00	110.000
	1980	13,32	49,70	4,88	32,10	-	100,00	231.139
	1990	13,63	37,22	10,88	38,27	-	100,00	439.024
	2000	11,93	37,83	13,45	36,79	-	100,00	699.850

Seperti halnya dengan pulau Sumatera, pulau Kalimantan juga merupakan daerah yang migran keluarannya kebanyakan ke pulau Jawa. Arus yang terjadi dari pulau Kalimantan menuju pulau Jawa cenderung tidak berubah sejak tahun 1971 sampai tahun 2000, hal ini terlihat dari perubahan persentase yang relatif kecil. Sementara itu untuk Kepulauan Lain, sampai tahun 1980 sebagian besar migran keluarannya masih ke pulau Jawa, namun sejak tahun 1990 hingga tahun 2000, arus migrasi mulai menunjukkan perubahan bahwa selain ke pulau Jawa, pulau Sulawesi juga menjadi daerah tujuan untuk pindah.

Berbeda halnya dengan pulau Sulawesi, arus migran yang keluar dari pulau ini hampir tersebar secara merata ke pulau-pulau lain dan kecenderungan ini sudah berjalan sejak tahun 1971 sampai tahun 2000. Walaupun terjadi perubahan persentase pada setiap periode tetapi kecenderungan arus migrasi dari periode ke periode menunjukkan semakin meratanya arus tujuan migrasi yang keluar dari pulau Sulawesi ke pulau-pulau lain.

Dapat dimaklumi mengapa pulau Jawa sebagai pulau yang menjadi daerah tujuan utama migran dari pulau-pulau yang lain. Pulau Jawa merupakan tempat pusat perekonomian, pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat kegiatan-kegiatan sosial ekonomi lainnya. Hal ini merupakan daya tarik yang sangat kuat sehingga banyak penduduk dari pulau-pulau di luar Jawa yang datang dan ingin menetap (tinggal) di pulau Jawa.

Tabel 3.3 menyajikan migran masuk seumur hidup menurut pulau tempat lahir dan tempat tinggal sekarang. Untuk migrasi masuk, pulau Sumatera adalah pulau yang paling banyak menerima migran, dimana yang terbanyak adalah dari pulau Jawa. Demikian halnya dengan pulau Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Lain, migran yang masuk ke pulau-pulau itu yang terbanyak adalah dari pulau Jawa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pulau Jawa memang merupakan pulau terpadat di Indonesia sehingga merupakan pulau pengirim migran terbesar untuk setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Sedangkan migrasi masuk ke pulau Jawa sendiri dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2000 kebanyakan berasal dari pulau Sumatera. Persentase migran dari pulau Sumatera yang masuk ke pulau Jawa terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1971, sekitar 60 persen migran pulau Sumatera masuk ke pulau Jawa. Kemudian pada tahun 1980 hingga tahun 1990 lebih dari 65 persen migran pulau Sumatera masuk ke pulau Jawa. Dan pada tahun 2000, migran pulau

Sumatera yang masuk ke pulau Jawa mencapai 69 persen. Kondisi ini menunjukkan betapa deras arus migran dari pulau Sumatera ke pulau Jawa, dan sebaliknya dari pulau Jawa ke pulau Sumatera.

Tabel 3.3
Persentase Migran Masuk Seumur Hidup menurut Pulau Tempat Lahir dan
Pulau Tempat Tinggal Sekarang, 1971-2000

Provinsi Tempat Lahir	Tahun	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang					Migran Masuk	
		Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Kepulauan Lain	%	Jumlah
Sumatera	1971	-	92,78	0,91	4,81	1,50	100.00	1.870.000
	1980	-	93,69	0,63	4,69	0,99	100.00	3.101.814
	1990	-	95,25	0,63	2,50	1,62	100.00	3.699.393
	2000	-	93,79	0,69	3,20	2,33	100.00	3.588.945
Jawa	1971	59,69	-	12,86	16,81	10,64	100.00	583.000
	1980	65,80	-	11,16	12,52	10,52	100.00	1.091.855
	1990	66,49	-	12,31	11,04	10,16	100.00	1.608.136
	2000	68,80	-	10,15	9,38	11,68	100.00	2.267.873
Kalimantan	1971	5,69	73,17	-	18,70	2,44	100.00	123.000
	1980	4,77	70,02	-	23,10	2,11	100.00	534.266
	1990	4,26	74,66	-	16,84	4,24	100.00	1.127.938
	2000	4,74	72,05	-	17,49	5,72	100.00	1.644.690
Sulawesi	1971	9,09	64,77	6,82	-	19,32	100.00	88.000
	1980	8,27	61,09	3,60	-	27,04	100.00	273.987
	1990	5,16	59,65	3,41	-	31,78	100.00	528.629
	2000	5,53	51,63	3,44	-	39,41	100.00	653.389
Kepulauan Lain	1971	5,31	46,90	1,77	46,02	-	100.00	113.000
	1980	6,59	45,56	1,54	46,31	-	100.00	301.483
	1990	5,19	61,90	1,35	31,56	-	100.00	601.103
	2000	5,17	70,02	1,75	23,05	-	100.00	703.673

3.2.2 Migrasi Risen Antar Pulau

Migrasi lima tahun yang lalu atau sering disebut migrasi risen dapat dibedakan menjadi migrasi masuk risen dan migrasi keluar risen. Migrasi keluar risen dari pulau Sumatera pada tahun 1980 adalah sekitar 0,3 juta jiwa dan sebagian besar (87,86 persen) menuju pulau Jawa, sisanya hampir merata ke pulau-pulau lain. Sebaliknya, migrasi risen keluar dari pulau Jawa sebanyak 1,1 juta dan sekitar 73 persennya menuju pulau Sumatera.

Arus migrasi dari pulau Kalimantan, pulau Sulawesi dan Kepulauan Lainnya juga menjadikan pulau Jawa sebagai daerah tujuan utama migrasi risen. Dari tahun 1980 sampai tahun 2000 arus migrasi risen dari pulau Kalimantan ke pulau Jawa lebih dari 60 persen. Pada tahun 1980 pulau Sumatera menjadi tujuan kedua, sedangkan pada tahun 1990 pulau Sulawesi menjadi tujuan kedua. Kemudian pada tahun 2000, selain 66 persen ke pulau Jawa, migran risen yang keluar dari pulau Kalimantan tersebar merata ke pulau-pulau lainnya. Migran risen dari pulau Sulawesi secara umum tersebar merata ke pulau-pulau lain di Indonesia. Sementara itu Kepulauan Lainnya pada tahun 1990 menjadikan pulau Sulawesi sebagai daerah tujuan utama migran risen.

Tabel 3.4
Persentase Migran Keluar Risen menurut Pulau Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang, 1980-2000

Pulau Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu	Tahun	Pulau Tempat Tinggal Sekarang					Migran Keluar	
		Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Kepulauan Lain	%	Jumlah
Sumatera	1980	-	87,86	4,36	4,19	3,59	100,00	297.207
	1990	-	89,50	2,54	5,66	2,30	100,00	81.397
	2000	-	87,73	5,31	3,98	2,98	100,00	423.965
Jawa	1980	73,20	-	13,68	7,03	6,09	100,00	1.107.035
	1990	64,61	-	18,41	7,07	9,91	100,00	318.917
	2000	48,05	-	27,78	6,68	17,49	100,00	812.631
Kalimantan	1980	16,20	68,11	-	12,20	3,49	100,00	64.393
	1990	5,58	64,94	-	21,77	7,71	100,00	29.248
	2000	12,30	66,29	-	11,03	10,38	100,00	86.415
Sulawesi	1980	14,87	27,19	26,69	-	31,25	100,00	143.036
	1990	9,32	18,85	20,53	-	51,30	100,00	26.931
	2000	11,31	38,07	31,34	-	19,28	100,00	157.256
Kepulauan Lain	1980	10,81	54,94	3,48	30,77	-	100,00	139.796
	1990	6,85	23,91	22,10	47,14	-	100,00	29.443
	2000	8,47	40,79	11,16	39,58	-	100,00	280.210

Dari kondisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa arus migrasi risen masuk ke pulau-pulau di Indonesia nampaknya dipengaruhi oleh jarak pulau itu sendiri. Pulau Sumatera yang secara geografis letaknya paling dekat dengan pulau Jawa, menyebabkan arus yang deras

antara kedua pulau tersebut. Migran yang masuk ke pulau Sumatera sebagian besar dari pulau Jawa, dan sebaliknya migran yang masuk ke pulau Jawa sebagian besar dari pulau Sumatera. Selain itu, arus perpindahan pada umumnya berasal dari daerah yang agak terbelakang pembangunannya ke daerah yang lebih maju. Akibatnya daerah yang sudah padat menjadi lebih padat, karena biasanya daerah yang sudah maju lebih padat penduduknya.

Sejak tahun 1980, banyaknya migran risen yang masuk ke pulau-pulau selain pulau Jawa merupakan hasil dari program transmigrasi dimana pulau Jawa yang merupakan sasaran dari program tersebut sedangkan pulau-pulau lainnya menjadi penerima program tersebut. Pulau Sumatera merupakan pulau yang paling banyak menerima migran terutama dari tahun 1980 hingga tahun 1990. Sementara pada tahun 2000, pulau Jawa yang paling banyak menerima migran risen masuk yaitu sebanyak 603.394 orang, sedangkan pulau Sumatera menjadi yang kedua terbanyak menerima migran risen masuk setelah pulau Jawa yaitu sebanyak 442.622 orang migran.

Tabel 3.5
Persentase Migran Masuk Risen menurut Pulau Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang, 1980-2000

Pulau Tempat Tinggal 5 Tahun yang lalu	Tahun	Pulau Tempat Tinggal Sekarang					Migran Masuk	
		Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Kepulauan Lain	%	Jumlah
Sumatera	1980	-	94,54	1,22	2,48	1,76	100,00	857.157
	1990	-	97,10	0,77	1,18	0,95	100,00	212.227
	2000	-	88,22	2,40	4,02	5,36	100,00	442.622
Jawa	1980	62,07	-	10,43	9,24	18,26	100,00	420.694
	1990	70,08	-	18,27	4,88	6,77	100,00	103.959
	2000	61,64	-	9,49	9,92	18,94	100,00	603.394
Kalimantan	1980	6,24	73,01	-	18,40	2,35	100,00	207.428
	1990	2,84	80,63	-	7,59	8,94	100,00	72.820
	2000	6,84	68,66	-	14,99	9,51	100,00	328.808
Sulawesi	1980	8,82	55,13	5,57	-	30,48	100,00	141.106
	1990	9,72	47,56	13,43	-	29,29	100,00	47.394
	2000	8,81	28,34	4,97	-	57,88	100,00	191.644
Kepulauan Lain	1980	8,53	53,93	1,80	35,74	-	100,00	125.082
	1990	3,78	63,78	4,55	27,89	-	100,00	49.536
	2000	6,51	73,24	4,62	15,63	-	100,00	194.009

3.3 Migrasi Antar Provinsi

Selain pergerakan migran seumur hidup dan migran risen antar pulau, mobilitas para migran antar provinsi-provinsi di Indonesia menarik pula untuk dicermati. Berdasarkan pola data sensus ini akan kita lihat provinsi mana di Indonesia yang berperan sebagai penerima migran terbesar dan provinsi manakah yang paling besar mengirimkan penduduknya sebagai pendatang di provinsi lain. Dari hitungan migrasi netonya, dapat diketahui apakah provinsi yang sebelumnya sebagai pengirim migran masih sejalan polanya di dekade tahun berikutnya sebagai provinsi pengirim migran pula.

3.3.1 Migrasi Seumur Hidup menurut Provinsi

Pola dan arus migrasi seumur hidup menurut provinsi sangat bervariasi dan besarnya tidak selalu sama antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Pola migrasi masuk seumur hidup menurut provinsi dari tahun 1971 sampai 2000 disajikan pada Tabel 3.6. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, DKI Jakarta adalah provinsi yang paling banyak didatangi oleh migran sejak tahun 1971 hingga tahun 2000, dengan jumlah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971 DKI Jakarta menerima sekitar 1,8 juta migran, tahun 1980 menerima sekitar 2,6 juta migran, tahun 1990 menerima 3,1 juta migran dan pada tahun 2000 menerima 3,5 juta migran.

Pada tahun 1971 dan 1980 Lampung merupakan provinsi kedua terbesar yang menjadi daerah tujuan migran dengan jumlah migran tidak kurang dari 1 juta orang pada tahun 1971 dan 1,8 juta migran pada tahun 1980 yang masuk ke provinsi ini. Hal ini dapat dimengerti karena Lampung merupakan daerah tujuan transmigrasi terbesar di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1990 provinsi Lampung tergeser oleh provinsi Jawa Barat sehingga menjadi provinsi ketiga terbesar yang didatangi oleh migran. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan pesatnya pembangunan perumahan dan industri di pinggiran kota Jakarta yang merupakan wilayah provinsi Jawa Barat. Sehingga banyak migran yang menjadikan Jawa Barat sebagai daerah tujuan migran. Pada tahun 2000 Lampung kembali tergeser oleh Riau dan Banten sehingga Lampung menjadi provinsi kelima yang terbanyak didatangi migran.

Tabel 3.6
Migran Masuk Seumur Hidup menurut Provinsi, 1971-2000

Provinsi	Migran Masuk Seumur Hidup			
	1971	1980	1990	2000
Nanggroe Aceh Darussalam	61.906	146.307	194.709	100.166
Sumatera Utara	547.405	570.863	459.652	447.897
Sumatera Barat	88.832	134.712	217.796	245.000
Riau	217.134	356.272	689.036	1.534.849
Jambi	160.041	298.366	473.434	566.153
Sumatera Selatan	333.875	617.745	936.817	987.157
Bengkulu	36.380	122.785	251.621	355.048
Lampung	1.003.550	1.793.053	1.730.903	1.485.218
Bangka Belitung	-	-	-	94.334
DKI Jakarta	1.821.833	2.599.367	3.170.215	3.541.972
Jawa Barat	383.560	1.003.758	2.408.626	3.271.882
Jawa Tengah	260.308	350.724	516.315	708.308
DI Yogyakarta	101.204	180.367	266.500	385.117
Jawa Timur	297.948	465.949	575.541	781.590
Banten	-	-	-	1.758.408
Bali	22.758	65.271	124.919	221.722
Nusa Tenggara Barat	34.117	56.081	69.466	107.605
Nusa Tenggara Timur	13.039	42.614	48.159	106.053
Kalimantan Barat	24.342	112.244	199.829	269.722
Kalimantan Tengah	50.235	142.257	241.192	423.014
Kalimantan Selatan	67.285	145.417	274.745	360.324
Kalimantan Timur	40.857	296.963	604.549	856.251
Sulawesi Utara	50.356	91.460	89.096	147.091
Sulawesi Tengah	51.320	187.024	287.447	369.634
Sulawesi Selatan	71.411	118.984	225.279	273.875
Sulawesi Tenggara	26.024	106.027	237.602	366.817
Gorontalo	-	-	-	26.888
Maluku	43.530	130.109	186.735	75.540
Maluku Utara	-	-	-	60.834
Papua	33.923	96.079	262.873	332.015

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa arus migrasi keluar per provinsi juga memiliki pola sendiri-sendiri. Tidak ada provinsi mempunyai pola yang sama dengan provinsi lainnya. Provinsi yang paling besar migran keluarnya adalah Jawa Tengah. Jumlah migran semur hidup yang keluar dari Jawa Tengah pada tahun 1971 adalah 1,8 juta. Sedangkan pada tahun 1980 melesat mencapai 3,2 juta, demikian pula di tahun 1990 menjadi 4,5 juta dan di tahun 2000 sekitar 5,3 juta. Tiga provinsi yang menjadi tujuan utama dari migran yang berasal dari Jawa Tengah sejak SP 1971 sampai SP 2000 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung.

Provinsi kedua yang paling banyak migran keluarnya pada tahun 1980, 1990, dan 2000 adalah Jawa Timur dengan jumlah migran masing-masing sebanyak 1,6 juta, 2,5 juta dan 3,1 juta. Provinsi DKI Jakarta, Lampung, dan Kalimantan Timur merupakan provinsi tujuan migran dari Jawa Timur.

Untuk wilayah Indonesia bagian timur, migran keluar semur hidup yang terbesar terdapat di Sulawesi Selatan. Dengan jumlah yang terus bertambah mulai dari 1971 sampai dengan 2000. Di tahun 1971 jumlah migrannya 242 ribu orang, kemudian meningkat sampai dua kali lipatnya di tahun 1980 menjadi 512 ribu orang. Jumlah ini meningkat kembali pada tahun 1990 dan 2000 yaitu sebesar 642 ribu dan 874 ribu migran. Pada tahun 1971 migran dari Sulawesi Selatan kebanyakan menuju Jambi, DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah, tetapi sejak tahun 1980 hingga 2000 polanya berubah dimana tujuan utamanya adalah ke Kalimantan Timur yang secara geografis letaknya memang dekat dengan Sulawesi Selatan. Selain itu, Kalimantan Timur terkenal dengan kekayaan alamnya seperti minyak bumi dan hasil hutan yang menjadi daya tarik para migran dari Sulawesi Selatan.

Tabel 3.7
Migran Keluar Seumur Hidup menurut Provinsi, 1971-2000

Provinsi	Migran Keluar Seumur Hidup			
	1971	1980	1990	2000
Nanggroe Aceh Darussalam	65.835	116.010	125.563	244.314
Sumatera Utara	188.326	417.659	770.093	1.336.772
Sumatera Barat	324.897	558.804	642.908	937.799
Riau	41.636	86.540	127.672	164.358
Jambi	27.487	47.151	77.299	149.376
Sumatera Selatan	199.060	333.024	443.384	525.954
Bengkulu	24.753	39.019	46.720	73.390
Lampung	29.728	57.664	167.565	385.748
Bangka Belitung	-	-	-	120.027
DKI Jakarta	132.215	400.767	1.052.234	1.836.664
Jawa Barat	1.192.987	1.487.935	1.751.879	2.046.279
Jawa Tengah	1.798.001	3.227.892	4.524.988	5.354.459
DI Yogyakarta	266.933	253.447	508.215	784.154
Jawa Timur	749.848	1.597.851	2.479.487	3.063.297
Banten	-	-	-	475.440
Bali	57.072	117.828	221.599	250.724
Nusa Tenggara Barat	12.764	44.487	96.774	145.546
Nusa Tenggara Timur	26.222	47.534	99.442	156.602
Kalimantan Barat	35.109	72.358	116.735	154.620
Kalimantan Tengah	11.514	25.086	47.700	53.291
Kalimantan Selatan	84.257	169.561	201.936	255.595
Kalimantan Timur	23.723	34.059	63.533	90.635
Sulawesi Utara	60.837	121.231	153.466	151.326
Sulawesi Tengah	34.274	33.912	48.360	74.463
Sulawesi Selatan	241.726	511.725	641.961	874.338
Sulawesi Tenggara	30.771	89.957	107.673	95.189
Gorontalo	-	-	-	113.050
Maluku	36.613	64.725	95.361	157.066
Maluku Utara	-	-	-	43.712
Papua	6.449	15.559	30.786	46.824

Migrasi neto seumur hidup hasil SP 1971, SP 1980, SP 1990 dan SP 2000 pada Tabel 3.8 menunjukkan bahwa hampir semua provinsi polanya tidak berubah, kecuali provinsi NAD, Sumatera Utara, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Jika angka migrasi neto positif berarti lebih banyak migran yang masuk daripada jumlah migran yang keluar atau dengan kata lain merupakan provinsi penerima migran, sedangkan angka migrasi neto negatif berarti lebih banyak migran yang keluar daripada yang masuk ke provinsi tersebut dan merupakan provinsi pengirim migran.

Secara umum provinsi-provinsi di pulau Jawa dan Nusa Tenggara merupakan provinsi-provinsi pengirim migran baik pada tahun 1971, 1980, 1990, maupun tahun 2000 kecuali Jakarta, Jawa Barat dan Banten. DKI Jakarta sejak tahun 1971 hingga pada tahun 2000 merupakan provinsi penerima migran. Dua provinsi pada periode yang sama tetap sebagai pengirim migran terbesar adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, provinsi-provinsi yang polanya berubah dapat dibedakan sebagai berikut:

- Provinsi yang pada tahun 1971 sebagai pengirim migran, yang kemudian sejak tahun 1980 hingga tahun 2000 berubah sebagai penerima migran adalah provinsi Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.
- Provinsi yang pada tahun 1971 hingga tahun 1980 sebagai penerima migran, kemudian sejak tahun 1990 hingga tahun 2000 sebagai pengirim migran adalah provinsi Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat.
- Provinsi yang pada tahun 1971 hingga tahun 1980 sebagai pengirim migran, kemudian sejak tahun 1990 hingga tahun 2000 sebagai penerima migran adalah provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.
- Provinsi yang pada tahun 1971 hingga tahun 1990 sebagai penerima migran, tetapi pada tahun 2000 sebagai pengirim migran adalah provinsi Maluku.
- Tahun 1971, provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan provinsi pengirim migran, kemudian sejak tahun 1980 hingga tahun 1990 sebagai penerima migran, tetapi pada tahun 2000 kembali berubah sebagai provinsi pengirim migran.

Tabel 3.8
Migran Neto Seumur Hidup menurut Provinsi, 1971-2000

Provinsi	Migran Neto Seumur Hidup			
	1971	1980	1990	2000
Nanggroe Aceh Darussalam	-3.929	30.297	69.146	-144.148
Sumatera Utara	359.079	153.204	-310.441	-888.875
Sumatera Barat	-236.065	-424.092	-425.112	-692.799
Riau	175.498	269.732	561.364	1.370.491
Jambi	132.554	251.215	396.135	416.777
Sumatera Selatan	134.815	284.721	493.433	461.203
Bengkulu	11.627	83.766	204.901	281.658
Lampung	973.822	1.735.389	1.563.338	1.099.470
Bangka Belitung	-	-	-	-25.693
DKI Jakarta	1.689.618	2.198.600	2.117.981	1.705.308
Jawa Barat	-809.427	-484.177	656.747	1.225.603
Jawa Tengah	-1.537.693	-2.877.168	-4.008.673	-4.646.151
DI Yogyakarta	-165.729	-73.080	-241.715	-399.037
Jawa Timur	-451.900	-1.131.902	-1.903.946	-2.281.707
Banten	-	-	-	1.282.968
Bali	-34.314	-52.557	-96.680	-29.002
Nusa Tenggara Barat	21.353	11.594	-27.308	-37.941
Nusa Tenggara Timur	-13.183	-4.920	-51.283	-50.549
Kalimantan Barat	-10.767	39.886	83.094	115.102
Kalimantan Tengah	38.721	117.171	193.492	369.723
Kalimantan Selatan	-16.972	-24.144	72.809	104.729
Kalimantan Timur	17.134	262.904	541.016	765.616
Sulawesi Utara	-10.481	-29.771	-64.370	-4.235
Sulawesi Tengah	17.046	153.112	239.087	295.171
Sulawesi Selatan	-170.315	-392.741	-416.682	-600.463
Sulawesi Tenggara	-4.747	16.070	129.929	271.628
Gorontalo	-	-	-	-86.162
Maluku	6.917	65.384	91.374	-81.526
Maluku Utara	-	-	-	17.122
Papua	27.474	80.520	232.087	285.191

3.3.2 Migrasi Risen menurut Provinsi

Pola migrasi risen menurut provinsi hanya mengulas hasil dari tiga sensus penduduk, yaitu SP 1980, SP 1990 dan SP 2000, karena pada SP 1971 tidak ada pertanyaan tempat tinggal 5 tahun yang lalu.

Tabel 3.9 menyajikan tren migrasi masuk risen, dimana secara umum pada periode 1980 hingga tahun 2000 Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak menerima migran. Tahun 1980 migran masuk ke Jawa Barat sekitar 551,9 ribu orang, tetapi 10 tahun kemudian melonjak sampai dua setengah kali lipatnya menjadi 1,3 juta orang. Di tahun 2000 migran masuk risen ke Jawa Barat seolah-olah mengalami penurunan dibanding tahun 1990, hal ini disebabkan berpisahnya Banten dari Jawa Barat. Munculnya Jawa Barat sebagai provinsi yang paling banyak menerima migran risen di Indonesia mungkin disebabkan karena adanya kota-kota penyangga seperti Bogor, Depok dan Bekasi di sekitar wilayah Ibukota negara.

Untuk wilayah Sumatera, pola seperti Jawa Barat terjadi pada provinsi Riau. Migran masuk risen di Riau juga mencapai dua setengah kali lipat di tahun 1990 yaitu sebesar 245,5 ribu migran jika dibanding sepuluh tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2000 jumlah migran masuk risennya terus melonjak mencapai 526,7 ribu orang, mencapai lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 1990. Riau adalah provinsi penghasil minyak terbesar di Sumatera, diduga kekayaan alam tersebut menjadi daya tarik ribuan migran untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan nyaman disana.

Provinsi yang paling sedikit menerima migran risen adalah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Di Tahun 1980 dan 1990 jumlah migran masuk risennya hanya berada di bawah 38 ribu orang, sementara di sebagian besar provinsi yang lain jumlahnya sudah di atas 50 ribu orang.

Tren migran masuk risen yang mengalami penurunan dari tahun 1980 sampai 2000 terjadi di provinsi Lampung. Menurut hasil SP 1980, jumlah migran masuk risen di Lampung mencapai 507,8 ribu orang, tetapi di tahun 1990 migran risen yang datang ke Lampung hanya 212,3 ribu orang. Di tahun 1980 Lampung masih menjadi daerah tujuan transmigrasi. Pada tahun 2000, jumlahnya semakin berkurang kembali menjadi sekitar 149 ribu orang.

Tabel 3.9
Migran Masuk Risen menurut Provinsi, 1980-2000

Provinsi	Migran Masuk Risen		
	1980	1990	2000
Nanggroe Aceh Darussalam	51.208	56.326	15.369
Sumatera Utara	95.586	107.882	139.887
Sumatera Barat	93.117	129.049	109.016
Riau	98.652	245.465	526.711
Jambi	107.273	136.397	109.534
Sumatera Selatan	221.165	212.196	163.250
Bengkulu	66.902	82.831	68.832
Lampung	507.803	212.298	149.013
Bangka Belitung	-	-	36.536
DKI Jakarta	766.363	833.029	702.202
Jawa Barat	551.960	1.350.596	1.097.021
Jawa Tengah	183.761	384.753	354.204
DI Yogyakarta	98.856	161.740	196.586
Jawa Timur	203.175	328.607	185.966
Banten	-	-	620.299
Bali	37.254	65.967	87.225
Nusa Tenggara Barat	26.221	37.401	59.964
Nusa Tenggara Timur	25.976	27.107	69.910
Kalimantan Barat	39.380	43.809	49.202
Kalimantan Tengah	49.699	78.791	124.387
Kalimantan Selatan	61.704	98.330	89.320
Kalimantan Timur	112.620	194.531	155.498
Sulawesi Utara	45.498	34.736	54.504
Sulawesi Tengah	83.595	70.034	75.328
Sulawesi Selatan	65.208	119.455	79.757
Sulawesi Tenggara	51.014	71.143	110.289
Gorontalo	-	-	9.257
Maluku	46.904	68.701	18.657
Maluku Utara	-	-	14.764
Papua	33.420	73.776	63.829

Secara umum pola migran keluar risen sebagian besar provinsi-provinsi di Indonesia mengalami kenaikan dari satu sensus ke sensus berikutnya seperti yang disajikan pada Tabel 3.10. Jawa Tengah merupakan provinsi pengirim migran terbesar berdasarkan hasil SP 1980, SP 1990 dan SP 2000. Sementara DKI Jakarta berada di urutan kedua sebagai provinsi dengan migran keluar risen terbanyak. Daerah utama tujuan migran dari Jawa Tengah adalah provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat sejak tahun 1980 sampai 2000. Sedangkan untuk migran risen yang keluar dari DKI Jakarta mayoritas memilih tinggal di Jawa Barat dan Banten. Karena lahan untuk tempat tinggal di Jakarta sudah semakin berkurang, ditambah dengan keadaan ibukota yang semakin padat komunitas penduduknya dan semakin kompleks masalah polusi udaranya sehingga diduga menyebabkan ratusan ribu warganya memilih tinggal di seputaran bodetabek yang merupakan daerah perbatasan DKI Jakarta.

Selain provinsi-provinsi di pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi-provinsi yang paling banyak pula jumlah migran risen keluarnya. Jika melihat tren migran keluar risen di Sumatera Utara dari 1980 sampai 2000, terdapat kenaikan yang cukup besar setiap 10 tahunnya, yaitu sekitar 50 persen di tahun 1990 dan 30 persen di tahun 2000. Sumatera Utara mempunyai salah satu etnis yang terkenal suka merantau, yaitu suku Batak. Sedangkan di Sumatera Barat ada suku Minangkabau, Sumatera Selatan dengan suku Palembangnya, dan suku Bugis di Sulawesi Selatan. Provinsi favorit yang dipilih para migran dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk bertempat tinggal adalah Riau, provinsi yang kaya akan minyak buminya. Jumlah migran risen keluar di Sumatera Selatan pada tahun 1990 mengalami kenaikan sebesar 66 ribu orang dari 132 ribu migran di tahun 1980. Tetapi pada tahun 2000 terjadi penurunan sekitar 46 ribuan migran dibanding tahun 1990. Arus migran dari Sumatera Selatan kebanyakan menuju provinsi Lampung. Untuk Sulawesi Selatan, tren migran keluar risen dari 1980 sampai 2000 cenderung naik terus, walaupun di tahun 2000 kenaikannya cukup melambat dibanding kenaikan di tahun 1990. Provinsi tujuan utama para migran dari Sulawesi Selatan adalah provinsi Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur.

Tabel 3.10
Migran Keluar Risen menurut Provinsi, 1980-2000

Provinsi	Migran Keluar Risen		
	1980	1990	2000
Nanggroe Aceh Darussalam	28.248	49.389	161.581
Sumatera Utara	177.289	277.647	358.521
Sumatera Barat	153.239	173.220	233.945
Riau	53.757	92.903	91.280
Jambi	36.178	64.033	83.346
Sumatera Selatan	132.011	198.841	151.956
Bengkulu	15.899	28.595	35.831
Lampung	45.594	135.907	149.258
Bangka Belitung	-	-	33.773
DKI Jakarta	382.326	993.377	850.343
Jawa Barat	468.441	495.727	631.753
Jawa Tengah	908.302	1.159.694	1.017.494
DI Yogyakarta	72.933	120.777	129.530
Jawa Timur	570.555	647.348	529.037
Banten	-	-	207.358
Bali	52.404	56.127	47.353
Nusa Tenggara Barat	38.987	36.853	50.714
Nusa Tenggara Timur	34.713	45.620	54.989
Kalimantan Barat	28.431	44.686	45.682
Kalimantan Tengah	15.989	37.015	24.903
Kalimantan Selatan	46.061	76.447	62.612
Kalimantan Timur	20.334	68.192	42.817
Sulawesi Utara	38.259	51.272	38.830
Sulawesi Tengah	17.282	28.038	30.555
Sulawesi Selatan	147.855	161.050	169.663
Sulawesi Tenggara	29.575	36.681	22.251
Gorontalo	-	-	33.448
Maluku	26.995	38.899	92.781
Maluku Utara	-	-	28.480
Papua	16.191	31.631	30.155

Tabel 3.11 menyajikan migrasi neto risen menurut provinsi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa hingga tahun 2000 arus migrasi risen masih didominasi oleh provinsi-provinsi di pulau Jawa baik sebagai provinsi pengirim maupun sebagai provinsi penerima migran. Sekitar 40 persen provinsi di Indonesia mempunyai pola migran neto risen positif dari hasil SP 1980, SP 1990 dan SP 2000. Sedangkan 5 dari 30 provinsi di Indonesia mempunyai pola migran neto negatif, artinya sebagai provinsi pengirim migran.

Pada tahun 1980 Lampung menjadi provinsi yang migrasi neto positifnya paling besar yaitu 0,46 juta. Ini terkait dengan adanya program transmigrasi dimana provinsi Lampung banyak menerima transmigran. Sementara pada tahun 1990 dan tahun 2000, provinsi Jawa Barat yang memiliki angka migrasi risen neto positif terbesar, yaitu 0,8 juta di tahun 1990 dan 0,46 juta di tahun 2000. Kemungkinan ini berkaitan dengan cepatnya pembangunan di Jawa Barat dan letaknya yang berdekatan dengan ibukota negara.

Mulai tahun 1980 sampai tahun 2000, provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang paling besar angka migrasi risen neto negatifnya daripada provinsi-provinsi lainnya. Angka migrasi neto berdasarkan hasil dari ketiga sensus bergerak di sekitaran 0,7 juta. Pada tahun 1980 sebesar 0,73 juta, tahun 1990 sebesar 0,77 juta dan 0,66 juta migran di tahun 2000. Ini berarti lebih banyak migran risen yang keluar dari provinsi Jawa Tengah daripada migran risen yang masuk ke provinsi ini.

Tabel 3.11
Migran Neto Risen menurut Provinsi, 1980-2000

Provinsi	Migran Neto Risen		
	1980	1990	2000
Nanggroe Aceh Darussalam	22.960	6.937	-146.212
Sumatera Utara	-81.703	-169.765	-218.634
Sumatera Barat	-60.122	-44.171	-124.929
Riau	44.895	152.562	435.431
Jambi	71.095	72.364	26.188
Sumatera Selatan	89.154	13.355	11.294
Bengkulu	51.003	54.236	33.001
Lampung	462.209	76.391	-245
Bangka Belitung	-	-	2.763
DKI Jakarta	384.037	-160.348	-148.141
Jawa Barat	83.519	854.869	465.268
Jawa Tengah	-724.541	-774.941	-663.290
DI Yogyakarta	25.923	40.963	67.056
Jawa Timur	-367.380	-318.741	-343.071
Banten	-	-	412.941
Bali	-15.150	9.840	39.872
Nusa Tenggara Barat	-12.766	548	9.250
Nusa Tenggara Timur	-8.737	-18.513	14.921
Kalimantan Barat	10.949	-877	3.520
Kalimantan Tengah	33.710	41.776	99.484
Kalimantan Selatan	15.643	21.883	26.708
Kalimantan Timur	92.286	126.339	112.681
Sulawesi Utara	7.239	-16.536	15.674
Sulawesi Tengah	66.313	41.996	44.773
Sulawesi Selatan	-82.647	-41.595	-89.906
Sulawesi Tenggara	21.439	34.462	88.038
Gorontalo	-	-	-24.191
Maluku	19.909	29.802	-74.124
Maluku Utara	-	-	-13.716
Papua	17.229	42.145	33.674

IV. POLA MIGRASI MENURUT HASIL SUPAS

4.1 Pertanyaan Tentang Migrasi di SUPAS

Informasi mengenai migrasi yang digunakan dari hasil SUPAS meliputi informasi migrasi yang terdapat pada SUPAS 1985, SUPAS 1995 dan SUPAS 2005. Pada tahun 1976 BPS menyelenggarakan SUPAS, tetapi cakupannya hanya 10.000 rumah tangga di Jawa dan Bali. Sedangkan untuk SUPAS berikutnya sudah mencakup seluruh wilayah Indonesia. Jenis pertanyaan mengenai migrasi penduduk pada SUPAS 1976, SUPAS 1985, SUPAS 1995, dan SUPAS 2005 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Pertanyaan Tentang Migrasi Penduduk
Pada Survei Penduduk Antar Sensus 1976, 1985, 1995, dan 2005

SUPAS 1976	SUPAS 1985	SUPAS 1995	SUPAS 2005
1. Tempat tinggal sekarang			
2. Provinsi dan kab/kota tempat lahir			
3. Lamanya tinggal di provinsi sekarang			
4. Pernah tinggal di kab/kota lain?			
5. Provinsi dan kab/kota tempat tinggal terakhir sebelum disini	5. Provinsi dan kab/kota tempat tinggal terakhir sebelum disini	5. Provinsi dan kab/kota tempat tinggal terakhir sebelum disini	5. Provinsi dan kab/kota tempat tinggal terakhir sebelum disini
6. Prov dan kab/kota tempat tinggal 5 tahun yang lalu	6. Prov dan kab/kota tempat tinggal 5 tahun yang lalu	6. Prov dan kab/kota tempat tinggal 5 tahun yang lalu	6. Prov , kab/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal 5 tahun yang lalu
	7. Alasan pindah dari tempat tinggal sebelumnya	7. Alasan pindah dari tempat tinggal 5 tahun yang lalu	7. Alasan pindah dari tempat tinggal 5 tahun yang lalu
			8. Apakah melakukan migran periodik?
			9. Apakah melakukan komuter?

Dalam SUPAS ada lima pertanyaan yang digunakan untuk penentuan dan penghitungan migrasi yaitu tempat tinggal sekarang, tempat lahir, lama tinggal di tempat tinggal sekarang, tempat tinggal terakhir sebelum tempat tinggal sekarang, dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Pada SUPAS 2005 ada pertanyaan baru mengenai kegiatan migrasi periodik yaitu kegiatan pulang ke tempat asal atau kampung halamannya secara rutin yang frekuensinya mulai dari seminggu sekali, sebulan sekali sampai 2-6 bulan sekali. Selain itu mulai SUPAS 2005 dikumpulkan informasi mengenai komuter, yaitu kegiatan ulang alik setiap hari dari rumah ke kantor, sekolah atau tempat lain yang lokasinya berada di luar kabupaten/kota tempat tinggalnya sekarang.

Pada pembahasan berikut akan diulas pola migrasi seumur hidup dan migrasi risen baik migrasi masuk, migrasi keluar, maupun migrasi netonya menurut provinsi. Apakah polanya sejalan antara SUPAS yang satu dengan yang lainnya. Untuk SUPAS 2005 tidak termasuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), karena saat itu terjadi gempa dan tsunami disana sehingga NAD tidak masuk dalam cakupan SUPAS 2005. Untuk NAD diadakan sensus tersendiri yaitu SPAN (Sensus Penduduk Aceh Nias), tetapi dalam sensus tersebut tidak dicantumkan pertanyaan mengenai migrasi.

4.2 Migrasi Seumur Hidup menurut Provinsi

Tabel 4.2 menyajikan migrasi masuk seumur hidup menurut provinsi. Sejalan dengan pola sensus, untuk migran masuk seumur hidup dari hasil SUPAS 1985 sampai 2005, secara umum DKI Jakarta merupakan provinsi yang banyak didatangi oleh migran. Jumlah migran yang masuk ke DKI Jakarta dari tahun 1985-2005, angkanya paling besar dibanding provinsi lain, yaitu diatas 3 jutaan. Lebih dari 30 persen migran seumur hidup yang masuk ke DKI Jakarta berasal dari Jawa Tengah. Urutan berikutnya adalah Jawa Barat dengan jumlah migran yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun 1985 sebesar 1,4 juta menjadi 3,6 juta di tahun 1995. Pada tahun 2005 kenaikannya hanya sekitar 100 ribuan di banding tahun 1995. Diduga Jawa Barat menjadi tempat limpahan migran yang menuju Jakarta, terutama untuk kota-kota di sekitarnya seperti Bogor, Depok, dan Bekasi.

Tabel 4.2
Migran Masuk Seumur Hidup menurut Provinsi, 1985-2005

Provinsi	Migran Masuk Seumur Hidup		
	1985	1995	2005
Nanggroe Aceh Darussalam	159.495	228.641	-
Sumatera Utara	485.155	552.450	447.332
Sumatera Barat	138.294	260.845	300.322
Riau	315.399	884.769	1.335.873
Jambi	344.905	482.795	551.469
Sumatera Selatan	576.482	1.038.898	902.044
Bengkulu	120.106	332.080	311.326
Lampung	1.861.253	1.923.928	1.596.545
Bangka Belitung	-	-	95.129
Kepulauan Riau	-	-	542.811
DKI Jakarta	3.079.693	3.371.384	3.337.161
Jawa Barat	1.367.377	3.615.099	3.764.889
Jawa Tengah	530.385	672.978	741.588
DI Yogyakarta	229.125	347.245	466.941
Jawa Timur	567.143	808.995	660.663
Banten	-	-	1.731.081
Bali	53.897	157.902	249.951
Nusa Tenggara Barat	61.539	75.227	100.811
Nusa Tenggara Timur	42.469	57.915	102.222
Kalimantan Barat	85.164	250.617	263.080
Kalimantan Tengah	137.971	325.028	393.828
Kalimantan Selatan	182.663	321.955	400.562
Kalimantan Timur	384.418	741.109	990.736
Sulawesi Utara	74.819	76.084	165.689
Sulawesi Tengah	170.323	351.609	358.601
Sulawesi Selatan	132.060	304.296	341.770
Sulawesi Tenggara	160.035	260.141	341.057
Gorontalo	-	-	39.487
Maluku	119.244	160.477	73.356
Maluku Utara	-	-	63.384
Papua	156.756	274.276	430.167

Jika kita amati hasil SUPAS 1985 dan 1995, terjadi kenaikan migran masuk seumur hidup yang cukup signifikan untuk provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Jumlah migran masuk mencapai dua kali lipatnya untuk tahun 1995 jika dibandingkan dengan tahun 1985. Sumatera Barat pada tahun 1985 yang jumlah migrannya 138 ribu naik menjadi 261 ribu sepuluh tahun kemudian. Tahun 1985 Sumatera Selatan dengan 0,5 juta migran naik di tahun 1995 menjadi 1 jutaan. Sedangkan Kalimantan Timur di tahun 1995 jumlah migran masuknya 741 ribu padahal sepuluh tahun sebelumnya jumlahnya masih 384 ribu dan Sulawesi Tengah dengan jumlah migran masuk sebesar 170 ribu di tahun 1985 naik menjadi 352 ribu di tahun 1995. Untuk keempat provinsi ini di tahun 2005 jumlah migran masuk seumur hidupnya tidak terlalu besar kenaikan atau penurunannya.

Kenaikan yang sangat besar juga terjadi di Bali dan Kalimantan Barat dimana jumlah migrannya pada tahun 1985 sebesar 54 ribu dan 85 ribu naik lebih dari tiga kali lipatnya di tahun 1995 menjadi 158 ribu dan 251 ribu. Sedangkan di tahun 2005 untuk Bali jumlahnya naik kembali menjadi 250 ribu dan untuk Kalimantan Barat terjadi kenaikan sedikit menjadi sebesar 263 ribu orang. Migran yang masuk ke Bali berdasarkan pola SUPAS ini sebagian besar berasal dari Jawa Timur, sedangkan yang masuk Kalimantan Barat didominasi oleh migran dari provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tabel 4.3 berikut menyajikan migrasi keluar seumur hidup menurut provinsi. Dari tren SUPAS ini ternyata Jawa Tengah merupakan provinsi terbesar migran keluar seumur hidupnya baik untuk SUPAS 1985, 1995 dan 2005. Tren ini sesuai dengan pola migran keluar dari hasil sensus. Di tahun 1985 jumlah migran keluar sebesar 3,3 juta, naik cukup besar di tahun 1995 menjadi 5 juta, dan naik kembali di tahun 2005 yang mencapai 5,5 juta.

Provinsi Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang paling kecil jumlah migran keluar seumur hidupnya jika dibandingkan dengan provinsi yang lain. Berdasarkan hasil SUPAS 1985-2005, jumlahnya tidak mencapai 100 ribu orang. Di ketiga provinsi ini dari 1985 sampai 2005 jumlah migran keluarnya cenderung mengalami kenaikan.

Tabel 4.3
Migran Keluar Seumur Hidup menurut Provinsi, 1985-2005

Provinsi	Migran Keluar Seumur Hidup		
	1985	1995	2005
Nanggroe Aceh Darussalam	119.178	181.574	-
Sumatera Utara	562.885	1.025.451	1.314.117
Sumatera Barat	559.636	837.493	921.180
Riau	93.745	169.941	208.049
Jambi	50.138	112.204	134.793
Sumatera Selatan	368.622	580.077	573.865
Bengkulu	39.664	66.762	82.703
Lampung	112.144	273.061	447.476
Bangka Belitung	-	-	99.223
Kepulauan Riau	-	-	9.612
DKI Jakarta	593.936	1.589.285	2.045.630
Jawa Barat	1.660.517	1.891.615	1.984.620
Jawa Tengah	3.305.362	5.014.822	5.538.952
DI Yogyakarta	656.190	861.679	814.289
Jawa Timur	1.822.761	2.879.389	3.220.158
Banten	-	-	444.503
Bali	159.011	230.149	248.007
Nusa Tenggara Barat	42.163	107.261	143.435
Nusa Tenggara Timur	58.460	118.625	173.884
Kalimantan Barat	72.646	126.834	156.631
Kalimantan Tengah	35.590	57.448	87.712
Kalimantan Selatan	195.946	245.595	297.766
Kalimantan Timur	48.115	88.646	97.498
Sulawesi Utara	150.142	218.240	166.157
Sulawesi Tengah	31.513	47.793	75.776
Sulawesi Selatan	541.446	792.342	968.140
Sulawesi Tenggara	68.628	125.403	122.593
Gorontalo	-	-	100.691
Maluku	83.513	135.727	170.627
Maluku Utara	-	-	47.039
Papua	25.495	47.356	46.882

Pola migrasi neto seumur hidup disajikan pada Tabel 4.4 Sebagian besar provinsi di Indonesia mempunyai pola migrasi neto seumur hidup yang tetap, sebagai pengirim migran atau sebagai penerima migran. Provinsi pengirim migran ditunjukkan dengan angka migrasi negatif, provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan provinsi-provinsi penerima migran berdasarkan hasil SUPAS 1985 sampai 2005 untuk wilayah Sumatera adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Untuk pulau Jawa hanya DKI Jakarta yang merupakan provinsi tujuan migran yang utama. Semua provinsi di pulau Kalimantan termasuk kategori penerima migran seumur hidup, kecuali Kalimantan Selatan. Di wilayah Indonesia Timur provinsi penerima migrannya adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua.

Untuk provinsi-provinsi yang pola migran seumur hidupnya berubah dapat dibedakan sebagai berikut:

- Provinsi yang pada tahun 1985 sebagai penerima migran, yang kemudian sejak tahun 1995 hingga 2005 berubah sebagai pengirim migran adalah Nusa Tenggara Barat.
- Provinsi yang pada tahun 1985 dan 1995 sebagai penerima migran, tetapi pada tahun 2005 sebagai provinsi pengirim migran adalah provinsi Maluku.
- Provinsi yang pada tahun 1985 sebagai pengirim migran, yang kemudian sejak tahun 1995 hingga 2005 berubah sebagai penerima migran adalah Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.
- Provinsi yang pada tahun 1985 dan 1995 sebagai pengirim migran, tetapi pada tahun 2005 sebagai provinsi penerima migran adalah provinsi Bali.

Tabel 4.4
Migran Neto Seumur Hidup menurut Provinsi, 1985-2005

Provinsi	Migran Neto Seumur Hidup		
	1985	1995	2005
Nanggroe Aceh Darussalam	40.317	47.067	-
Sumatera Utara	-77.730	-473.001	-866.785
Sumatera Barat	-421.342	-576.648	-620.858
Riau	221.654	714.828	1.127.824
Jambi	294.767	370.591	416.676
Sumatera Selatan	207.860	458.821	328.179
Bengkulu	80.442	265.318	228.623
Lampung	1.749.109	1.650.867	1.149.069
Bangka Belitung	-	-	-4.094
Kepulauan Riau	-	-	533.199
DKI Jakarta	2.485.757	1.782.099	1.291.531
Jawa Barat	-293.140	1.723.484	1.780.269
Jawa Tengah	-2.774.977	-4.341.844	-4.797.364
DI Yogyakarta	-427.065	-514.434	-347.348
Jawa Timur	-1.255.618	-2.070.394	-2.559.495
Banten	-	-	1.286.578
Bali	-105.114	-72.247	1.944
Nusa Tenggara Barat	19.376	-32.034	-42.624
Nusa Tenggara Timur	-15.991	-60.710	-71.662
Kalimantan Barat	12.518	123.783	106.449
Kalimantan Tengah	102.381	267.580	306.116
Kalimantan Selatan	-13.283	76.360	102.796
Kalimantan Timur	336.303	652.463	893.238
Sulawesi Utara	-75.323	-142.156	-468
Sulawesi Tengah	138.810	303.816	282.825
Sulawesi Selatan	-409.386	-488.046	-626.370
Sulawesi Tenggara	91.407	134.738	218.464
Gorontalo	-	-	-61.204
Maluku	35.731	24.750	-97.271
Maluku Utara	-	-	16.345
Papua	131.261	226.920	383.285

4.3 Migrasi Risen menurut Provinsi

Migran masuk risen yang terbesar selama kurun waktu 1985 sampai 2005 berdasarkan hasil SUPAS adalah provinsi Jawa Barat seperti yang disajikan dalam Tabel 4.5 Tahun 1985 migran masuknya mencapai 0,56 juta, tetapi di tahun 1995 jumlahnya naik pesat sekali mencapai dua kali lipatnya menjadi 1,1 juta. Sementara di tahun 2005 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 0,7 juta. Migran yang masuk ke Jawa Barat ini sekitar 48 persen berasal dari DKI Jakarta yang menempati urutan pertama dan sekitar 20 persen dari Jawa Tengah di urutan kedua. DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling dekat dengan Jawa Barat menempati posisi kedua untuk jumlah migran masuk risen yang terbanyak. Berbeda dengan pola Jawa Barat, dari tahun 1985 sampai 2005 terjadi penurunan jumlah migran masuk risen di DKI Jakarta. Dari 684 ribu migran masuk di tahun 1985, turun sekitar 90 ribuan di tahun 1995 menjadi 594 ribu, sedangkan angka tersebut turun kembali di tahun 2005 tetapi penurunannya hanya sebesar 50 ribuan orang.

Tren migran masuk di wilayah Sumatera untuk provinsi Lampung mengalami penurunan, hal ini masih sejalan dengan pola migran masuk risen menurut hasil sensus. Sementara untuk wilayah Sulawesi, terjadi penurunan migran masuk risen di Sulawesi Tenggara berdasarkan pola SUPAS, tetapi jika kita perhatikan dari pola sensus malah sebaliknya terjadi kenaikan jumlah migran masuk antara SP 1980, SP 1990 dan SP 2000.

Provinsi yang mengalami pola migran masuk yang cenderung meningkat terjadi di Sumatera Utara, Riau, Jambi, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi di provinsi Riau dimana pada tahun 1995 jumlah migrannya bertambah sekitar 70 persen dari tahun 1985. Tahun 1985 jumlah migran masuk di Riau adalah 92 ribu, sedangkan pada tahun 1995 menjadi 147 ribu orang. Selanjutnya di tahun 2005 jumlah tersebut bertambah naik lagi menjadi 214 ribu orang. Migran yang masuk ke Riau ini didominasi oleh migran yang berasal dari provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Tabel 4.5
Migran Masuk Risen menurut Provinsi, 1985-2005

Provinsi	Migran Masuk Risen		
	1985	1995	2005
Nanggroe Aceh Darussalam	37.692	28.498	-
Sumatera Utara	59.600	103.258	107.330
Sumatera Barat	75.757	138.531	108.252
Riau	91.881	147.518	213.867
Jambi	52.647	57.057	66.347
Sumatera Selatan	105.064	128.011	65.994
Bengkulu	33.386	65.933	32.668
Lampung	126.677	114.206	91.858
Bangka Belitung	-	-	19.906
Kepulauan Riau	-	-	154.291
DKI Jakarta	684.001	594.542	575.173
Jawa Barat	560.460	1.117.615	730.878
Jawa Tengah	171.473	351.942	327.604
DI Yogyakarta	112.331	165.324	189.890
Jawa Timur	165.731	438.446	250.155
Banten	-	-	290.876
Bali	23.565	58.177	76.589
Nusa Tenggara Barat	26.762	45.914	26.947
Nusa Tenggara Timur	20.050	32.741	33.348
Kalimantan Barat	19.331	44.752	16.449
Kalimantan Tengah	33.328	36.477	31.513
Kalimantan Selatan	55.752	69.244	62.574
Kalimantan Timur	83.976	138.627	149.389
Sulawesi Utara	14.783	21.852	28.863
Sulawesi Tengah	28.067	70.833	52.297
Sulawesi Selatan	48.453	137.341	103.215
Sulawesi Tenggara	69.547	56.937	40.716
Gorontalo	-	-	11.082
Maluku	23.860	22.968	9.615
Maluku Utara	-	-	10.365
Papua	52.771	53.298	51.630

Tabel 4.6 menyajikan pola migran keluar risen dari tahun 1985 sampai 2005. Hanya tiga provinsi yang mempunyai pola kenaikan jumlah migran keluar dari tahun 1985 sampai 2005, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Papua. Walaupun polanya meningkat, kenaikannya di ketiga provinsi tersebut berfluktuasi. Di Sumatera Utara untuk kurun waktu 1985-1995 terjadi kenaikan migran keluar sebesar 21 persen, sedangkan untuk sepuluh tahun berikutnya yaitu antara 1995-2005 kenaikannya turun drastis hanya 1,5 persen. Pada provinsi Kalimantan Tengah, jumlah migran keluar risen di tahun 1985 sebesar 18 ribu orang, sedangkan di tahun 1995 menjadi 43 ribu orang, atau terjadi kenaikan yang sangat besar yaitu sekitar 135 persen. Sedangkan dari tahun 1995 ke 2005 kenaikannya hanya 10 persen, dengan jumlah migran keluar di tahun 2005 sebesar 47 ribu migran. Jumlah migran keluar di Papua selama kurun waktu 1985-1995 mengalami kenaikan sebesar 41 persen, sedangkan untuk kurun waktu 1995-2005 kenaikannya berkurang hampir setengahnya yaitu sekitar 28 persen. Migran yang keluar dari Papua lima tahun sebelum survei ini kebanyakan menuju Sulawesi Selatan yang merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di kawasan Timur Indonesia.

Untuk provinsi-provinsi yang lain polanya berbeda dengan ketiga provinsi di atas. Terjadi kenaikan jumlah migran keluar di kurun waktu 1985-1995 tetapi untuk kurun waktu sepuluh tahun berikutnya malah terjadi penurunan. Empat provinsi yang kenaikan migran keluarnya paling besar antara tahun 1985-1995 adalah Riau, Bengkulu, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Paling besar kenaikannya adalah Sulawesi Tenggara dimana pada tahun 1985 jumlah migran keluarnya sebesar 13 ribu orang, kemudian naik sebesar 204 persen di tahun 1995 menjadi 39 ribu orang. Kenaikan terbesar kedua ditemukan di provinsi Riau. Antara tahun 1985 sampai 1995 terdapat kenaikan migran keluar sebesar 177 persen. Jumlah migran keluar yang sebelumnya sebesar 46 ribu di tahun 1985 naik menjadi sekitar 126 ribu di tahun 1995. Provinsi Bengkulu dan Kalimantan Timur pola kenaikannya hampir sama antara hasil SUPAS 1985 dan SUPAS 1995, yaitu sekitar 150 persen.

Tabel 4.6
Migran Keluar Risen menurut Provinsi, 1985-2005

Provinsi	Migran Keluar Risen		
	1985	1995	2005
Nanggroe Aceh Darussalam	21.269	48.478	-
Sumatera Utara	163.858	198.873	201.898
Sumatera Barat	133.285	144.607	128.758
Riau	45.656	126.372	98.794
Jambi	32.160	52.695	51.367
Sumatera Selatan	111.645	187.213	106.772
Bengkulu	14.082	35.739	29.982
Lampung	85.136	165.921	110.869
Bangka Belitung	-	-	17.791
Kepulauan Riau	-	-	8.605
DKI Jakarta	398.737	823.045	734.584
Jawa Barat	350.074	448.779	443.039
Jawa Tengah	607.532	732.415	662.193
DI Yogyakarta	102.453	111.019	87.741
Jawa Timur	336.177	410.609	344.266
Banten	-	-	132.867
Bali	26.688	45.298	38.959
Nusa Tenggara Barat	15.722	34.916	32.340
Nusa Tenggara Timur	24.598	43.248	30.200
Kalimantan Barat	18.534	34.030	32.955
Kalimantan Tengah	18.306	43.071	47.273
Kalimantan Selatan	50.782	56.360	41.824
Kalimantan Timur	30.456	76.009	47.478
Sulawesi Utara	30.230	48.142	31.813
Sulawesi Tengah	12.008	28.017	27.464
Sulawesi Selatan	89.819	149.148	139.342
Sulawesi Tenggara	12.771	38.806	30.685
Gorontalo	-	-	15.616
Maluku	24.547	45.936	30.417
Maluku Utara	-	-	16.529
Papua	18.760	26.496	33.869

Pola migrasi neto risen disajikan pada Tabel 4.7. Hampir separuh provinsi di Indonesia mempunyai pola migrasi neto risen yang bernilai positif, yaitu sebagai provinsi penerima migran. Provinsi-provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Jawa Barat merupakan provinsi penerima migran yang terbesar dengan jumlah migran netonya di tahun 1985 sebesar 0,2 juta orang, kemudian pada tahun 1995 sekitar 0,7 juta orang dan di tahun 2005 sebesar 0,3 juta orang.

Sementara itu provinsi yang tetap konsisten sebagai pengirim migran berdasarkan hasil SUPAS 1985-2005 adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Jika dibandingkan dengan pola sensus, provinsi yang konsisten polanya hanya tiga, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk Sumatera Selatan terjadi pola yang berbeda. Berdasarkan pola sensus, Sumatera Selatan termasuk kategori provinsi penerima migran, tetapi dari pola SUPAS masuk kelompok provinsi pengirim migran.

Untuk provinsi-provinsi yang pola migran risennya berubah dapat dibedakan sebagai berikut:

- Provinsi yang pada tahun 1985 sebagai penerima migran risen, yang kemudian sejak tahun 1995 hingga 2005 berubah sebagai pengirim migran risen adalah provinsi Lampung, DKI Jakarta, dan Kalimantan Tengah.
- Provinsi yang pada tahun 1985 dan 1995 sebagai penerima migran, tetapi pada tahun 2005 sebagai provinsi pengirim migran adalah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat.
- Provinsi yang pada tahun 1985 sebagai pengirim migran risen, yang kemudian sejak tahun 1995 hingga 2005 berubah sebagai penerima migran risen adalah provinsi Bali.
- Provinsi yang pada tahun 1985 dan 1995 sebagai pengirim migran, tetapi pada tahun 2005 sebagai provinsi penerima migran adalah provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi pengirim migran di tahun 1985, kemudian pada tahun 1995 berubah sebagai penerima migran, tetapi sepuluh tahun kemudian kembali berubah sebagai provinsi pengirim migran.

Tabel 4.7
Migran Neto Risen menurut Provinsi, 1985-2005

Provinsi	Migran Neto Risen		
	1985	1995	2005
Nanggroe Aceh Darussalam	16.423	-19.980	-
Sumatera Utara	-104.258	-95.615	-94.568
Sumatera Barat	-57.528	-6.076	-20.506
Riau	46.225	21.146	115.073
Jambi	20.487	4.362	14.980
Sumatera Selatan	-6.581	-59.202	-40.778
Bengkulu	19.304	30.194	2.686
Lampung	41.541	-51.715	-19.011
Bangka Belitung	-	-	2.115
Kepulauan Riau	-	-	145.686
DKI Jakarta	285.264	-228.503	-159.411
Jawa Barat	210.386	668.836	287.839
Jawa Tengah	-436.059	-380.473	-334.589
DI Yogyakarta	9.878	54.305	102.149
Jawa Timur	-170.446	27.837	-94.111
Banten	-	-	158.009
Bali	-3.123	12.879	37.630
Nusa Tenggara Barat	11.040	10.998	-5.393
Nusa Tenggara Timur	-4.548	-10.507	3.148
Kalimantan Barat	797	10.722	-16.506
Kalimantan Tengah	15.022	-6.594	-15.760
Kalimantan Selatan	4.970	12.884	20.750
Kalimantan Timur	53.520	62.618	101.911
Sulawesi Utara	-15.447	-26.290	-2.950
Sulawesi Tengah	16.059	42.816	24.833
Sulawesi Selatan	-41.366	-11.807	-36.127
Sulawesi Tenggara	56.776	18.131	10.031
Gorontalo	-	-	-4.534
Maluku	-687	-22.968	-20.802
Maluku Utara	-	-	-6.164
Papua	34.011	26.802	17.761

V. PENUTUP

Berdasarkan pola migrasi seumur hidup hasil sensus penduduk 1971 sampai tahun 2000, ternyata pulau Jawa tetap merupakan pulau pengirim migran terbesar di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, dengan volume yang terus meningkat. Pada periode tersebut migran keluar dari pulau Jawa sebagian besar menuju ke pulau Sumatera, namun demikian sejak tahun 1990 penyebaran penduduk dari pulau Jawa tidak lagi terfokus ke Sumatera tetapi sudah mulai merata ke pulau-pulau lainnya. Pulau kedua sebagai pengirim migran terbesar adalah Sumatera, dimana lebih dari 90 persen migran mempunyai daerah tujuan pulau Jawa. Seperti halnya migran dari Sumatera, migran dari pulau Kalimantan sebagian besar juga menuju ke pulau Jawa. Berbeda dengan arus migran dari pulau-pulau lain, arus migran keluar dari pulau Sulawesi dan Kepulauan Lain tersebar hampir merata ke pulau-pulau lainnya.

Untuk migrasi masuk seumur hidup, pulau Sumatera merupakan pulau yang paling banyak menerima migran, dimana yang terbanyak berasal dari Jawa. Demikian pula dengan Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Lain, migran yang masuk ke pulau-pulau itu yang terbanyak juga berasal dari pulau Jawa. Sedangkan migran masuk ke Jawa dari tahun 1971 sampai tahun 2000 kebanyakan berasal dari pulau Sumatera.

Arus migrasi risen masuk ke pulau-pulau di Indonesia dipengaruhi oleh jarak antar pulau itu sendiri. Pulau Sumatera yang secara geografis letaknya paling dekat dengan pulau Jawa, menyebabkan arus yang deras antara kedua pulau tersebut. Migran risen yang masuk ke pulau Sumatera sebagian besar dari Jawa, dan sebaliknya migran yang masuk ke pulau Jawa sebagian besar dari Sumatera.

Migrasi neto seumur hidup hasil sensus menunjukkan bahwa hampir semua provinsi polanya tidak berubah. Provinsi-provinsi pengirim migran yang ditandai dengan angka migrasi neto negatif adalah Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Jawa Tengah merupakan provinsi pengirim migran seumur hidup terbesar dengan pola yang terus naik mulai dari SP 1971 sampai

SP 2000. Sementara untuk provinsi yang termasuk kelompok provinsi penerima migran seumur hidup antara lain adalah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Papua.

Sekitar 40 persen provinsi di Indonesia mempunyai pola migrasi neto risen positif berdasarkan hasil SP 1980, SP 1990 dan SP 2000. Pada tahun 1980 Lampung menjadi provinsi penerima migran terbesar, karena saat itu masih gencar program transmigrasi dimana Lampung banyak menerima transmigran. Sementara pada tahun 1990 dan tahun 2000 posisinya diambil alih Jawa Barat. Kemungkinan ini terkait dengan cepatnya pembangunan di Jawa Barat, utamanya untuk kabupaten/kota yang berdekatan dengan ibukota negara.

Sejalan dengan hasil sensus, Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan berdasarkan hasil SUPAS 1985, SUPAS 1995, dan SUPAS 2005 ternyata masih tetap sebagai provinsi pengirim migran seumur hidup, karena mempunyai angka migrasi neto yang negatif. Sedangkan provinsi-provinsi penerima migran seumur hidup yang polanya sejalan antara sensus dan SUPAS adalah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Papua.

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi-provinsi yang tetap konsisten sebagai pengirim migran risen berdasarkan hasil SP 1980-2000 dan SUPAS 1985-2005. Sementara provinsi-provinsi penerima migran risen yang polanya masih sejalan antara sensus dan SUPAS adalah Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 1972, *"Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 1971 Seri D"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1978, *"Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 1976 Seri Tabulasi Nomor 5"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1983, *"Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 1980 Seri S2"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1983, *"Perpindahan Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil SP 1980"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1984, *"Analisa Migrasi Indonesia Berdasarkan Data SP 1971 dan SP 1980"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1987, *"Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 1985 Seri 5"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1992, *"Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 1990 Seri S2"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1994, *"Tren Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1996, *"Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 1995 Seri S2"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 2001, *"Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2000 Seri L2.2"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 2006, *"Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005 Seri S1"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 2006, *"Estimasi Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Hasil SUPAS 2005"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Henry S. Syrok, Jacob S. Siegel and Associate, 1980 *"The Methods and Materials of Demography"*, US Departement of Commerce, Washington DC, USA.

Ida Bagus Mantra, 1987, *"Migrasi Penduduk di Indonesia Berdasarkan Hasil SUPAS 1985"*,
Badan Pusat Statistik, Jakarta.

LDFEUI, 2007, *"Dasar-Dasar Demografi"*, LDFEUI, Depok.

United Nation, 1970, *"Methods of Measuring Internal Migration"*, Manual VI, United Nations,
New York.

<https://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4. Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id>. Email: bpsHQ@bps.go.id

ISBN 978-999-08-100-0

